

**PROFIL GENDER KOTA SEMARANG TAHUN 2022
DENGAN ANGGARAN TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG**

**Jl. Prof. Sudarto, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
Jawa Tengah 50269**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua rahmat dan karunianya sehingga penyusunan buku “Profil Gender Kota Semarang Tahun 2022 dengan Anggaran Tahun 2023” telah diselesaikan dengan baik.

Menurut sejarah, perhatian dunia secara formal mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan sudah dimulai pada tahun 1948 melalui deklarasi yang disebut *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh PBB. Sedangkan di tahun 1984, Pemerintah Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui UU No 7 Tahun 1984.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berspektif gender yang dimaksud diatas, diperlukan data terpilah berdasarkan jenis kelamin agar siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan partisipasi dan kontribusi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek pembangunan yang berkelanjutan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan gambaran keadaan nyata Kota Semarang dilihat dari perspektif gender. Dan diharapkan data-data dalam buku ini bisa menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan program khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang terkait untuk menyusun program-program pembangunan yang berkeadilan gender.

Kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Ir. Hj, Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos, selaku Walikota Semarang
2. Bapak Ir. Iswar Aminuddin, MT selaku Sekretaris Daerah Kota Semarang
3. Sekretariat DPRD Kota Semarang
4. Dan segenap Kepala OPD yang telah memberikan bantuan dan dukungan data yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan untuk melengkapi isi buku ini.

Terimakasih

Semarang, 24 Juli 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19640502 198503 1 017

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	3
3. Dasar Hukum	4
4. Ruang Lingkup dan Metodologi	5
5. Sistematika Laporan	6
BAB II : TEORI GENDER	
1. Gender	8
2. Gender Sebagai Konstruksi Sosial di Masyarakat	9
3. Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan	13
4. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	15
5. Konsep Terkait Dengan Gender	17
BAB III : GAMBARAN KOTA SEMARANG	
1. Sejarah Kota Semarang	19
2. Visi dan Misi Kota Semarang	19
3. Kondisi Geografis	21
4. Kependudukan	26
BAB IV : PROFIL GENDER	
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	32
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	33
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	34
4. Pengeluaran Per-Kapita	37
5. Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan	39
6. Angka Harapan Hidup (AHH)	41
7. Perempuan dan Kesehatan	43
8. Perempuan dan Pendidikan	52
9. Perempuan dan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Komunikasi	60

10. Perempuan dan Pengambil Keputusan, Politik, Hukum, Jabatan Struktural	68
11. Perempuan dan Sosial Budaya	72
12. Perempuan dan Kekerasan	75
BAB V : PENUTUP	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	:	Jumlah Kecamatan; Kelurahan dan Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kota Semarang
Tabel 3.2	:	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang
Tabel 3.3	:	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2022
Tabel 3.4	:	Komposisi Penduduk Menurut Umur
Tabel 4.1	:	IPM Menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2020-2022
Tabel 4.2	:	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Semarang Tahun 2020-2022
Tabel 4.3	:	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Semarang Tahun 2020-2022
Tabel 4.4	:	IDG Berdasarkan Peran Perempuan di Kota Semarang
Tabel 4.5	:	IDG Berdasarkan Peran Perempuan di Parlemen
Tabel 4.6	:	Perbandingan Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kota Semarang dengan Kabupaten sekitarnya
Tabel 4.7	:	Pengeluaran per Kapita (Ribuan Rupiah)
Tabel 4.8	:	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)
Tabel 4.9	:	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Menurut Jenis Kelamin
Tabel 4.10	:	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang
Tabel 4.11	:	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang dan Sekitarnya
Tabel 4.12	:	Angka Harapan Hidup (AHH)
Tabel 4.13	:	Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2022
Tabel 4.14	:	Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Semarang Tahun 2022
Tabel 4.15	:	Jumlah Peserta KB di Kota Semarang Tahun 2022
Tabel 4.16	:	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Semarang Tahun 2022

Tabel 4.17	:	APK Siswa TK, TKLB, RA di Kota Semarang Tahun 2022/2023
Tabel 4.18	:	APK, APM, APS Siswa SD Sederajat di Kota Semarang Tahun 2022/2023
Tabel 4.19	:	APK, APM, APS Siswa SMP Sederajat di Kota Semarang Tahun 2022/2023
Tabel 4.20	:	APK dan APM Siswa SMA Sederajat di Kota Semarang Tahun 2020/2021
Tabel 4.21	:	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin
Tabel 4.22	:	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin
Tabel 4.23	:	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang Tahun Ajaran 2022/2023
Tabel 4.24	:	Jumlah Anak Didik di Kota Semarang Tahun Ajaran 2022/ 2023
Tabel 4.25	:	Penduduk Usia Kerja Di Kota Semarang Tahun 2022
Tabel 4.26	:	Tingkat Kesempatan Angkatan Kerja Tahun 2022
Tabel 4.27	:	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2022
Tabel 4.28	:	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2022
Tabel 4.29	:	Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022
Tabel 4.30	:	Perempuan dan Koperasi Tahun 2022
Tabel 4.31	:	Perempuan di Bidang Politik dan Hukum
Tabel 4.32	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang
Tabel 4.33	:	Data PMKS di Kota Semarang Tahun 2022
Tabel 4.34	:	Korban Kekerasan Menurut Umur Tahun 2022
Tabel 4.35	:	Korban Perempuan Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2022
Tabel 4.36	:	Korban Perempuan Menurut Status Perkawinan Tahun 2022
Tabel 4.37	:	Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022
Tabel 4.38	:	Data Korban Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Peta Kota Semarang

Gambar 3.2 : Grafik Komposisi Penduduk Menurut Umur

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masih banyak orang beranggapan bahwa gender itu identik dengan perempuan bahkan ada yang berpendapat bahwa gender itu sama dengan jenis kelamin. Ini membuktikan bahwa di kalangan masyarakat umum pemahaman gender belum sepenuhnya benar. Hal ini sangat beralasan karena kurang massifnya penyadaran gender di kalangan masyarakat. Isu tentang gender mengemuka ke publik juga baru belakangan ini sehingga perspektif masyarakat belumlah sepenuhnya dapat dimengerti.

Belajar mengenai gender tidak hanya sekedar upaya memahami perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial yang integral. Sedangkan konstruksi sosial yang cenderung membedakan laki-laki dan perempuan, berdampak tidak hanya pada pengalaman yang berbeda antara keduanya, tetapi menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender ini menjadi problem pembangunan, khususnya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

Penyadaran konsep gender harus dimulai dengan pemahaman umum mengenai gender secara terpisah. Kata Gender berasal dari bahasa Latin “genus”, yang artinya tipe atau jenis dan pemahaman gender dalam konteks sosial budaya. Secara etimologis, gender atau sex adalah jenis kelamin. Sedangkan secara terminologis gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat maka gender tidak berlaku selamanya, tergantung waktu (tren) dan tempatnya. Jadi dapat disimpulkan, Gender ditentukan oleh sosial budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan.

Pemenuhan kesetaraan gender menjadi layak diperhatikan karena memiliki dasar aspek filosofis yaitu Pancasila sebagai falsafah Negara dalam Sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung makna bahwa keadilan berlaku bagi setiap manusia.

Tahun 1984, Pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan sehingga Pemerintah Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui UU No 7 Tahun 1984. Menurut Pemerintah, diskriminasi terhadap perempuan akan mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG). Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Dalam visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang didalamnya mencerminkan pemenuhan kesetaraan gender dilihat dari kata “adil” berarti tidak ada pembatasan/gender. Oleh sebab itu penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

Melanjutkan tujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah kota Semarang juga menekankan memenuhi isu gender melalui visi misi tahun 2021-2024. Visi kota Semarang : “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Hal ini menunjukkan bahwa Visi Kota Semarang

mendukung kesetaraan gender karena berlandaskan Pancasila di setiap gerak kegiatan. Pancasila menjunjung tinggi kesetaraan dan kebhinekaan.

Dalam salah satu misinya juga disebutkan : “Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan”. Sudah jelas bahwa pemerintah kota Semarang mendukung kesetaraan gender dari gambaran mengenai hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.

Strategi dan kebijakan pembangunan yang berdasarkan visi misi Kota Semarang harus tergambar di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi yang mendapat dukungan dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan agar prioritas pembangunan sudah responsif gender. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran nyata tentang besar kecilnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk itu penyusunan Profil Gender tepat dilakukan sebagai bentuk pemantauan perkembangan kebijakan dan pelaksanaan kesetaraan gender di Kota Semarang.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan profil ini adalah memberikan gambaran mengenai pemenuhan indikator kesetaraan gender yang ada di Kota Semarang di bidang demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Manfaat :

- a) Secara teoritis, buku ini dapat menambah pengetahuan tentang gambaran umum situasi kesetaraan gender di Kota Semarang.

- b) Secara praktis, buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan publik dan pihak-pihak terkait dengan data pembuka wawasan tentang kesetaraan gender untuk mengintegrasikan PUG dalam siklus pembangunan dan bahan kajian untuk proses pembangunan berkelanjutan..

3. Dasar Hukum

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilapan, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Inodneisa Tahun 1992 Nomor 89);
- h) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
- i) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- j) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- k) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- l) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Ttatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRrencana Pembangunan Daerah;
- m) Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
- n) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
- o) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tengn Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

4. Ruang Lingkup dan Metodologi

Ruang lingkup Penyusunan Profil Gender ini dilaksanakan melalui pengumpulan data primer dan sekunder di beberapa Perangkat Dinas (PD)

di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang. Data terpilah yang dibutuhkan merupakan informasi awal sebagai pembuka wawasan dan juga sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat partisipasi gender, sehingga menjadi faktor yang penting dalam pengarusutamaan gender.

Adapun data terpilah memiliki beberapa konsep yaitu :

- a. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang disesuaikan dengan topik bahasan yang menjadi perhatian.
- b. Data terpilah penduduk Kota Semarang
- c. Data terpilah dalam kurun waktu Januari - Desember 2022
- d. Data terpilah yang menggambarkan peran dan kondisi perempuan di beberapa aspek kehidupan baik di lingkungan masyarakat seperti pendidikan, ekonomi, pekerjaan maupun di rumah pribadi seperti penggunaan alat kontrasepsi.

Metode penyusunan profil ini meliputi :

1. Pengumpulan data
 - a. Pengumpulan data primer didapat langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan perangkat daerah yang berkepentingan.
 - b. Pengumpulan data sekunder bersumber dari PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Pendidikan; Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Polrestaes Semarang; Kejaksaan Negeri Semarang; Pengadilan Negeri Semarang; Sekretarian DPRD Semarang; Diskominfo ; Dinas Sosial Kota Semarang; Dinas Kesehatan; BPS Kota Semarang, BNN Provinsi Jateng; UPTD PPA Seruni.
2. Melaksanakan pengolahan data dari PD yang sesuai dengan ruang lingkup penyusunan Profil Gender dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

5. Sistematika Laporan

Sistematikan penulisan dalam Profil Gender Kota Semarang ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, dasar hukum dan ruang lingkup dan metodologi.

Bab II Teori Gender

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penulisan ini seperti gender; gender sebagai konstruksi sosial masyarakat; pengarusutamaan gender dan pembangunan; pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah; konsep-konsep terkait dengan gender

Bab III Gambaran Umum Kota Semarang

Bab ini berisi tentang sejarah Kota Semarang; visi dan misi Kota Semarang; kondisi geografis dan kependudukan.

Bab IV Profil Gender

Bab ini berisi tentang beberapa data terkait dengan gambaran kesetaraan gender di Kota Semarang baik di bidang ekonomi, politik maupun kekerasan pada perempuan dan anak

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang ringkasan hasil dari program Pemerintah Kota Semarang mengenai kesetaraan gender di Kota Semarang.

BAB II

TEORI GENDER

1. Gender

Kata Gender telah digunakan di Amerika tahun 1960an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Menurut Eline Sholwalter (1989) sebagaimana dikemukakan Umar (1999: 36) bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan patriarchal kemudian menggantikannya dengan isu gender. Sejak itu konsep gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia ke tiga. Adapun di Indonesia istilah gender lazim dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan “jender”, diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan (Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992 : 2).

Wilson (1998:2) dan Elaine Sholwalter seperti yang dikutip Zaitunah (2022:13) bahwa gender bukan hanya sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Karena itu, kata “gender” banyak diasosiasikan dengan kata yang lain seperti ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya, keduanya sulit untuk diberi pengertian secara terpisah. Adapun dalam Kepmendagri No. 132 disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat¹. Sedangkan Lips (1993:4) mengartikan “gender” sebagai *cultural*

¹ Kepmendagri No. 132 Tahun 2003, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

expectations for women and men atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

Sedangkan pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atas pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula, bersifat universal dan permanen, tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau kodrat. Dari sini melahirkan istilah identitas jenis kelamin.

Dengan demikian disimpulkan bahwa jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis, yang melekat pada keduanya. Jenis kelamin adalah tafsir sosial atas perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Disebut dengan perbedaan karena konstruksi sosial yang membentuk menjadi laki-laki dan menjadi perempuan mengalami proses dan perubahan. Dalam konteks ini gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial.

2. Gender Sebagai Konstruksi Sosial di Masyarakat

Studi tentang gender bukan hanya sekedar sebuah upaya memahami perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial yang integral. Konstruksi sosial yang cenderung membedakan laki-laki dan perempuan, berdampak tidak hanya pada pengalaman yang berbeda antara keduanya, tetapi terjadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum.

Ini sejalan dengan gerakan gender pada masa kini. Gerakan emansipasi lahir dari keinginan bukan melawan hegemoni laki-laki. Emansipasi adalah memberi kesempatan yang setara bagi kaum perempuan. Belajar dari RA Kartini (1879) aktivitasnya itu justru membuka kesempatan kepada dunia luar apa artinya sebuah perjuangan. Di

kemudian hari terbukti tak hanya perjuangan fisik yang berhasil mengusir kaum penjajah dari bumi pertiwi.

Emansipasi perempuan bermakna kesetaraan. Banyak pegiat gender pada masa sekarang terjebak pada upaya melawan “kodrat” semacam itu dengan yang penting berbeda dari laki-laki atau asal melawan. Sejalan dengan itu yang dilawan bukanlah laki-laki melainkan ideologi yang mempermiskin dan menindas kaum perempuan.

Karena itu memberi mereka kesempatan dalam pendidikan yang setara, menyediakan akses perwakilan di parlemen adalah cara-cara membuka selubung keterbelakangan perempuan. Perbudakan kaum perempuan masa sekarang harus dimaknai dengan makna baru. Perbudakan yang menyebabkan perempuan menderitalah yang harus terus dilawan. Kita masih berhadapan dengan persoalan perempuan seperti kekerasan, pernikahan usia dini, kemiskinan, kematian ibu masih menjadi persoalan yang tidak kunjung usai.

Di beberapa tempat masih ada anggapan perempuan perempuan ditempatkan sekedar *konco wingking* dan pelengkap saja. Urusannya masih di belakang. Oleh karena itu memfasilitasi perempuan keluar dari kungkungan itulah yang sekarang sangat diperlukan. Berikan mereka akses yang leluasa untuk kemajuan mereka sendiri demi kemajuan bangsa. Ketidakadilan gender harus dilawan sejak dari rumah.

Perbedaan yang berakar dari kelas sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras, warna kulit maupun perbedaan agama yang melahirkan masalah ketidakadilan sosial di masyarakat tersebut, secara bertahap dapat diatasi seiring dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Namun perbedaan jenis kelamin (gender) masih merupakan persoalan yang hingga kini belum selesai. Fenomena ini bukan hanya terjadi di negara terbelakang, dan negara berkembang, tetapi juga menjadi perjuangan perempuan di negara maju.

Perbedaan jenis kelamin sering digunakan masyarakat untuk mengkonstruksi pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas

dasar perbedaan tersebut. Pada pembagian kerja gender atas jenis kelamin di mana laki-laki dan perempuan melakukan jenis pekerjaan yang berbeda. Pembagian ini dipertahankan serta dilakukan secara terus menerus. Pembagian kerja berdasarkan gender tidak menjadi masalah selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan.

Dalam realitas kehidupan, perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan di atas melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Pembagian peran gender yang diberikan pada laki-laki dan perempuan, sifat kegiatan, dan jenis pekerjaan yang berbeda, seolah-olah laki-laki hanya dapat melakukan jenis pekerjaan tertentu, sebaliknya perempuan juga hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu pula. Pada umumnya masyarakat memandang tidak lazim jika peran tersebut ditukar atau diubah. Peran gender (*gender role*) tersebut kemudian diterima sebagai bantuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat.

Pandangan demikian berdampak pada munculnya diskriminasi gender yang tampil dalam bentuk :

- a) Sterotip gender (*gender stereotype*) yaitu pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang selalui berkonotasi negatif sehingga menimbulkan masalah. Misalnya, perempuan selalu dinilai lemah, penakut, cerewet, emosional kurang bisa bertanggungjawab dan sebagainya, sementara laki-laki dipandang kuat, keras, kasar, rasional, egois dan pencemburu. Pelabelan atau penandaan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin tertentu dapat menimbulkan kesan yang negative dan merugikan keduanya;
- b) Subordinasi, penempatan salah satu jenis kelamin lebih unggul dari jenis kelamin lainnya dari aspek status, peran dan relasi yang setara. Pandangan subordinat ini didasarkan pada stereotype gender yang dapat menghambat akses partisipasi dan kontrol, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya;

- c) Marjinalisasi merupakan proses peminggiran secara sistematis, baik disengaja atau tidak, terhadap jenis kelamin tertentu dari mendapatkan akses dan manfaat dalam kehidupan akibat adanya stereotype dan subordinasi sehingga yang mengalami marjinalisasi ini biasanya tidak/kurang dapat menjadi penikmat hasil pembangunan kendatipun mereka telah banyak berkontribusi dalam pembangunan. Sebagai dampaknya, salah satu jenis kelamin tertinggal dari jenis kelamin lainnya;
- d) Beban kerja berlipat dapat berupa pemaksanaan atau pengabaian salah satu jenis kelamin untuk menanggung beban aktifitas berlebihan. Hal ini disebabkan pembagian peran secara dikotomis produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan sehingga berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksibel. Pola kerja dikotomis dapat memicu ketidakadilan salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat.;
- e) Kekerasan (*violence*) berbasis gender yaitu kekerasan yang dilakukan oleh jenis kelamin berbeda yang disebabkan pandangan bias yang menempatkan salah satu jenis kelamin lebih superior dan yang lain dianggap inferior. Relasi gender yang timpang antara keduanya, menjadikan pihak yang merasa kuat berpotensi menindas pada yang lemah. Umumnya, kekerasan berbasis gender lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi dominan bahwa perempuan dicitrakan sebagai makhluk lemah yang dianggap wajar mendapatkan perlakuan demikian.

Diskriminasi gender tersebut secara umum terjadi di masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan juga tidak hanya terjadi pada kelas atau komunitas tertentu tetapi bisa terjadi pada semua strata sosial dan pada berbagai sub kultur di mana perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi gender dibanding dengan laki-laki. Diskriminasi gender dalam

berbagai bentuknya secara umum terjadi pada perempuan yang disebabkan oleh ²:

1. Budaya patriarki, yakni suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah) di mana laki-laki berkuasa untuk menentukan, mengatur dan mengambil keputusan;
2. Teks agama yang diinterpretasikan bias gender, disebabkan oleh pemahaman parsial sehingga kurang mencerminkan pesan-pesan agama yang menghargai perempuan, atau metode penafsiran terhadap teks yang kurang tepat sehingga menghasilkan pandangan keagamaan yang diskriminatif;
3. Kebijakan pemerintah baik melalui undang-undang maupun manajemen pemerintahan yang kurang responsif gender.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kebutuhan mendasar agar praktik diskriminasi gender dalam berbagai bentuk manifestasinya dapat diminimalisir guna meraih kesejahteraan pembangunan secara merata dan adil gender. Kesetaraan gender (*gender equity*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender (*gender justice*) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri disebutkan Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan³.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender sulit dilakukan secara cepat, karena masih mengalami kendala-kendala yang bersumber

² Ch., Mufidah. Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial. Malang: UIN- MALIKI Press, 2010, hal 8-11

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bab I, Ketentuan Umum, pasal 1, nomor 3 dan 4

dari legitimasi konstruksi budaya, interpretasi agama, dan kebijakan politik. Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh lini kehidupan perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap, baik dilakukan melalui kebijakan formal oleh negara maupun kebijakan informal oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama, keduanya menghadapi kendala-kendala struktural maupun kultural. Kesetaraan dan keadilan gender akan terwujud jika secara personal masing-masing individu telah memiliki sensitifitas gender, dan diikuti pula oleh kebijakan responsive gender di semua lembaga, instansi, organisasi pemerintah (*government*) maupun swasta (*non government*).

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender, yaitu :

1. Seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam pembangunan
2. Seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan lain sebagainya.

3. Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan

Sejak bergesernya paradigma pembangunan Nasional dalam bidang pemberdayaan perempuan dari *Woman in Development* dan *Women and Development* kepada paradigma *Gender dan Development*, kesetaraan dan keadilan gender diintegrasikan ke dalam siklus pembangunan. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender tersebut

diperlukan strategi yang disebut dengan gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender (PUG).

Pengertian pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dana program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan⁴. dengan demikian para pengambil kebijakan publik harus memiliki sensitifitas gender, sikap responsif terhadap kesetaraan dan keadilan gender dan mampu menciptakan budaya kerja yang ramah gender, agar tidak terjadi keberpihakan bias gender yang bertentangan dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Konsep PUG pertama kali muncul dalam pembahasan materi pada Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995, yang melahirkan *Beijing Platform of Action (BPFA)* dengan mengangkat 12 area kritis pemberdayaan perempuan. Dua belas area kritis tentang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia mulai dipetakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

Upaya pemerintah mengadopsi PUG dalam pembangunan ini merupakan langkah politis dan advokasi isu gender karena strategi ini bertumpu pada dua pendekatan. Pertama, meletakkan pemerintah sebagai *agent of change* bagi pembangunan yang adil gender. Kedua, melakukan intervensi terhadap semua tahap proses atau siklus pembangunan mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi⁵

⁴ Inpres No.9 tahun 2000, Kepmendagri no. 132 tahun 2003)

⁵ Silawati. Hartian, Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana?, Jurnal Perempuan Pengarusutamaan Gender, Jakarta, 2006, vol. 50, hal. 20

Sejak diimplementasikannya PUG dalam pembangunan di Indonesia, terjadi perubahan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, misalnya beberapa produk hukum yang berkaitan dengan hal ini adalah :

1. Amandemen UUD 1945 khususnya pasal 28 yang mencantumkan “Hak Asasi Perempuan”;
2. UU No. 12 tahun 2003 tentang keterwakilan perempuan 30% pada pemilu;
3. UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
4. Peraturan Pemerintah (PP) No 4 tahun 2006 tentang Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
6. Keputusan Presiden No 88 tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7. Kepres RI No 61 tahun 2003 tentang RAN Hak Asasi Manusia Indonesia yang mencantumkan hak-hak perempuan;
8. Pengesahan UU Perlindungan Saksi tahun 2006; Pengesahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2007.

4. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Pengarusutamaan gender sebagaimana yang tertuang dalam Impres No 9 tahun 2000, tidak hanya untuk pembangunan nasional saja, namun implementasinya ke tingkat daerah. Untuk itu diperlukan landasan yuridis yang mengatur secara khusus. Landasan yuridis dimaksud adalah dalam bentuk Kepmendagri No 132 tahun 2003 yang disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 15 tahun 2007. tujuan diterbitkannya Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah adalah untuk :

1. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui

- perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, tanggungjawab laki-laki; dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan

Dalam implementasinya, sebagaimana tertuang dalam Bab III Pasal 4 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, rencana strategis SKPD, dan rencana kerja SKPD. Sedangkan Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berpektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui analisis gender.

Peraturan ini tepatnya pada pasal 5 juga telah diatur bahwa dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dapat menggunakan metode Alur Kerja Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan data pembukaan wawasan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

5. Konsep terkait dengan Gender

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender, pada Bab I Ketentuan Umum terdapat beberapa konsep terkait dengan data gender :

- a. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi : pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
- b. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan , program, dan kegiatan pembangunan.
- c. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
- d. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambil keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
- e. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

- f. Pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, penghitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
- g. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
- h. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
- i. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk Badan, Biro atau Kantor.
- j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penyelenggara data gender dan anak.

BAB III

GAMBARAN KOTA SEMARANG

1. Sejarah Kota Semarang

Sejarah Kota Semarang berawal sekitar abad ke-8M, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota (sekarang menjadi Bergota) dan merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil akibat pengendapan yang saat ini masih terus terjadi.

Bagian bawah Kota Semarang dahulu merupakan lautan. Pelabuhannya diperkirakan di sekitar Pasar Bulu dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan, tempat dimana armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1405M. Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan masjid yang sampai sekarang masih dikunjungi wisatawan dan disebut Klenteng Sam Po Kong (Gedung Batu).

Pada akhir abad ke 15M seorang utusan Kerajaan Demak yaitu Pangeran Made Pandan menetap di daerah yang pada waktu itu menjadi semakin subur dan mulai bermunculan pohon asam yang arang (bahasa Jawa : Asem Arang) sehingga nama daerah tersebut menjadi Semarang.

Saat ini Kota Semarang menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar ke lima di Indonesia dan dipimpin oleh Walikota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu.

2. Visi dan Misi Kota Semarang

Visi Pembangunan Kota Semarang Tahun 201-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa **Visi Walikota dan Wakil Walikota** adalah :

“ Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

Misi pembangunan Kota Semarang :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.
- Misi 2 : Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha.
- Misi 3 : Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, perwujudan Kota Relegius seperti yang tercantum dalam dokumen RPJPD diharapkan akan tercapai.
- Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan Kota. Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tetap memperhatikan konsep

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.

Misi 5 : Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pemantapan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

3. Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara). Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}5'$ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni :

- a. koridor pantai Utara dengan panjang garis pantai sekitar 13,6 km;
- b. koridor Selatan ke arah Merapi-Merbabu (Magelang-Surakarta)
- c. koridor Timur yaitu arah Demak-Grobogan;
- d. arah Barat menuju Kabupaten Kendal.

Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak ada di Kecamatan Gunungpati dengan jumlah 16 kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memilki kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Candisari, Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Tugu dimana masing-masing memiliki 7

kelurahan. Berikut tersaji data mengenai kecamatan dan jumlah kelurahan yang ada di Kota Semarang.

Tabel 3.1
Jumlah Kecamatan; Kelurahan dan
Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Mijen	14	57.55
2	Gunungpati	16	54.11
3	Banyumanik	11	25.69
4	Gajah Mungkur	8	9.07
5	Semarang Selatan	10	5.93
6	Candisari	7	6.54
7	Tembalang	12	44.2
8	Pedurungan	12	20.72
9	Genuk	13	27.39
10	Gayamsari	7	6.18
11	Semarang Timur	10	7.7
12	Semarang Utara	9	10.97
13	Semarang Tengah	15	6.14
14	Semarang Barat	16	21.74
15	Tugu	7	31.78
16	Ngaliyan	10	37.99
	Kota Semarang	177	373.7

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Daerah Semarang memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan *kota bawah*. Kawasan kota bawah menjadi pusat kegiatan administrasi pemerintah Kota Semarang dengan adanya balai kota, gedung DPRD, Kantor Kepolisian Daerah, destinasi wisata seperti Kota Lama dan Lawang Sewu,

pusat perkantoran dan lainnya. Dengan adanya pembenahan di beberapa titik pusat kota, seperti : polder Stasiun Tawang, bandara udara diatas laut, pantai Marina, Museum Mandala, kuliner cafe, patung penari Semarang, Mall Tentrem dan The Park, menjadikan wajah Kota Semarang semakin memiliki daya tarik untuk dijadikan destinasi wisata kota. Program wisata keliling kota gratis dengan menggunakan bis tingkat makin menarik minat wisatawan datang ke Kota Semarang.

Tetapi daerah kota bawah seringkali dilanda banjir di sejumlah kawasan dan banjir ini sering disebabkan luapan air laut (rob). Dalam kurun waktu 5 tahun ini, banjir mulai dapat diatasi dengan dibangunnya sistem drainase kota yang baik, penambahan pompa air di beberapa titik rawan rob, revitalisasi dan normalisasi sungai Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Sungai Tenggang, Sungai Sringin dan Sungai Babon sehingga mampu menekan bencana banjir yang terjadi.

Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan *kota atas*, di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik. Pusat pertumbuhan di Semarang sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk muncul menjadi kota kecil baru. Seperti Kecamatan Banyumanik menjadi pusat pertumbuhan di Semarang atas, menjadikan daerah ini cukup padat. Fasilitas umum dan sosial yang mendukung aktivitas penduduk dalam bekerja maupun sebagai tempat tinggal juga telah terpenuhi. Banyumanik menjadi pusat pertumbuhan baru di Semarang bagian atas, dikarenakan munculnya aglomerasi perumahan di daerah ini.

Dahulunya Banyumanik hanya merupakan daerah sepi tempat tinggal penduduk Semarang yang bekerja di Semarang bawah (hanya sebagai *dormitory town*). Namun saat ini daerah ini menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan baru di Kota Semarang, dengan dukungan infrastruktur jalan dan aksesibilitas yang terjangkau. Fasilitas perdagangan dan perumahan baru banyak bermunculan di daerah ini, seperti Carefour, Mall Banyumanik, Mall Transmart, Ada Swalayan, Perumahan Banyumanik, Pagoda Avalokitesvara, tempat makan nuansa alam. Di Semarang bagian

atas juga tersedia fasilitas pendidikan baik negeri maupun swasta, seperti Undip, Polines, Unika, Unnes, dll. Dengan dukungan akses jalan tol dan terminal moda seperti bis trans dengan tiket murah makin memperlancar transportasi dari kota atas menuju kota bawah.

Wilayah Mijen bagian barat atas Kota Semarang juga memiliki perkembangan yang cepat dengan munculnya kota mandiri diatas lahan 100 hektar yang dinamakan Citraland BSB City. Area yang dijadikan central bisnis distrik baru dengan pemandangan indah yang dikelilingi pemandangan Gunung Ungaran, Gunung Sindoro dan Sumbing. Dengan pesatnya perkembangan kota mandiri membuat beberapa fasilitas modern didirikan di wilayah Mijen dan BSB seperti : danau sebagai drainase modern, sport club, Sirkuit Mijen, Wisata berkuda Nirwana Stable Mijen dan Uptownmall. Selain wisata, fasilitas pendidikan juga berkembang sejalan dengan pesatnya perumahan di wilayah tersebut. Dengan dibangunnya beberapa sekolah swasta dan kampus seperti UIN Walisongo, Universitas Soegijapranata (UNIKA) kawasan BSB, sehingga kota mandiri makin diminati warga pendatang untuk menetap di wilayah barat atas.

Kecamatan Gunungpati juga berada di wilayah atas, memiliki lahan dengan kontur yang kurang sesuai untuk lahan pemukiman, dengan memiliki tingkat kemiringan tinggi, lahan kritis, lahan untuk penyangga dan lahan untuk kawasan lindung. Kawasan ini dalam penataan ruang kota lebih diprioritaskan sebagai kawasan hijau dengan vegetasi yang mampu mereduksi kekritisian lahan agar dapat menjadi debit limpahan Sungai Garang yang menjadi penyebab banjir di Kota Semarang.

Walau kondisi Kecamatan Gunungpati sebagai lahan penyangga, tetapi wilayah ini memiliki potensi wisata alam yang banyak sehingga bermunculan desa wisata seperti : Desa Kandri, Desa Nongkosawit, dan Kampung Jawi, juga dikembangkan perkebunan buah yang salah satunya miliki Pemerintah Kota, dan terdapat kompleks sarana pendidikan yang luas yaitu Universitas Negeri Semarang.

Selain itu terdapat wisata Goa Kreo yang memiliki budaya Sesaji Rewanda yaitu melakukan perarakan hasil bumi sebagai ucapan syukur kepada Sang Pencipta yang dilaksanakan setiap tahun sekali pasca Hari Raya Lebaran dan untuk dipersembahkan pada kera-kera penghuni Goa Kreo.

Terdapat pula Waduk Jatibarang yang merupakan bangunan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan pengendali banjir secara terpadu dan serba guna. Jadi waduk tersebut fungsinya sangat penting karena disebut waduk serbaguna untuk penanggulangan banjir, penyediaan air minum, pasokan listrik sekaligus potensi pariwisata.

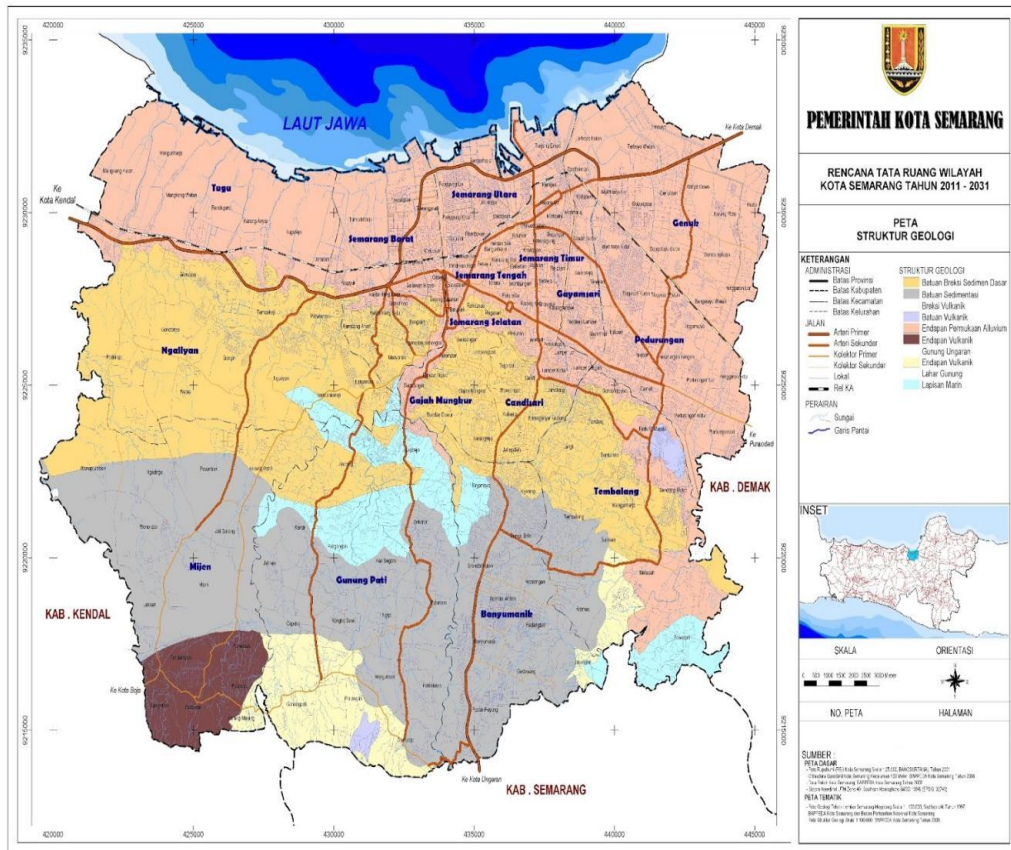
Kota Semarang sendiri memiliki luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Mijen dengan luas 57.55 km² kemudian Kecamatan Gunungpati dengan luas 54.11 km². kedua kecamatan tersebut berada di bagian kota atas yang merupakan area perkebunan dan persawahan. sedangkan wilayah kecamatan yang tersempit ada di Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5.93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 6.14km². Termasuk daerah kota bawah yang menjadi bagian dari pusat kegiatan perekonomian dan bisnis di Kota Semarang.

Secara keseluruhan wilayah administratif kecamatan di Kota Semarang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tergambar dalam peta mengenai batas wilayah per kecamatan :

Gambar 3.1

Peta Kota Semarang



Sumber : <https://bappedasemarang.wordpress.com/asd/>

4. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Bila laju pertumbuhan penduduk meningkat cepat maka pemerintah akan berusaha menciptakan program yang dapat menekan angka pertumbuhan tersebut, karena dengan menekan laju pertumbuhan penduduk akan membawa dampak positif bagi kualitas dan kuantitas penduduk di wilayah tersebut. Bila kualitas dan kuantitas penduduk terjaga maka akan berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dibawah ditunjukkan data laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang sepanjang tahun 2020-2022.

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang

Kota	Laju Pertumbuhan (%)		
	2020	2021	2022
Semarang	0.59	0.25	0.21

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Dilihat dari tabel diatas data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 menuju 2022 dapat ditekan. Tercatat tahun 2020 besaran laju pertumbuhan penduduk mencapai 0.59%, menurun cepat di tahun 2021 menjadi 0.25% dan menurun lagi di tahun 2022 sebesar 0.21%. hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program KB.

Fokus utama program penekanan laju penduduk yang dijalankan selain dengan program layanan KB gratis adalah melakukan pendampingan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, tumbuh kembang anak. Harapannya dengan pendampingan ibu dan anak sejak dini akan tercapai sumber daya manusia yang berkualitas.

Mengenai jumlah penduduk, dari sisi gender perlu juga mengetahui perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki untuk melakukan perencanaan program pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Wilayah di Kota Semarang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, yaitu 853.227 jiwa untuk perempuan dan laki-laki berjumlah 835.754 jiwa. Hal ini ditunjukkan dari data dibawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempu- an	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Semarang Tengah	27.840	30.120	57.960	91,76
2	Semarang Utara	58.941	60.380	119.321	97,66
3	Semarang Timur	34.087	35.972	70.059	94,16
4	Gayamsari	35.889	36.647	72.536	98,59
5	Genuk	62.516	62.118	124.634	100,52
6	Pedurungan	97.668	99.457	197.125	98,16
7	Semarang Selatan	32.474	34.159	66.633	94,52
8	Candisari	38.481	39.647	78.128	97,24
9	Gajahmungkur	28.648	29.581	58.229	96,17
10	Tembalang	94.455	95.234	189.689	99,11
11	Banyumanik	71.043	72.910	143.953	97,37
12	Gunungpati	49.606	49.751	99.357	100,02
13	Semarang Barat	75.964	78.387	154.351	96,38
14	Mijen	39.946	40.079	80.025	100
15	Ngaliyan	71.086	71.759	142.845	99,30
16	Tugu	17.110	17.026	34.136	100,43
	KOTA SEMARANG	835.754	853.227	1.688.981	97,93

Sumber : Disdukcapil tahun 2023

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Pedurungan dengan jumlah 197.125 jiwa; Kecamatan Tembalang dengan jumlah 189.689 jiwa; Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah 154.351 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki

penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Tugu dengan jumlah 34.136 jiwa.

Sedangkan rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Rasio jenis kelamin di Kota Semarang menunjukkan pangka 97,93 yang artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 97 orang laki-laki di Kota Semarang.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komponen penting dalam demografi. Dari komposisi umur akan terlihat apakah penduduk wilayah tertentu adalah penduduk yang memiliki usia produktif atau tidak. Sedangkan dari jenis kelamin juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam membuat program pengembangan rencana pembangunan manusia, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan lainnya yang berkeadilan gender.

Komposisi penduduk Kota Semarang menunjukkan bahwa sebagian besar usia masyarakatnya ada di usia produktif, yang mana usia produktif ada di antara usia 15 - 64 tahun dengan jumlah 1.183.941 jiwa. Usia yang belum produktif yaitu usia dibawah 15 tahun ada 360.777 jiwa, sedangkan usia tidak produktif yaitu usia 65 tahun keatas ada 115.257 jiwa.

Perhitungan rasio beban ketergantungan, yang memiliki rumus : jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) dibagi dengan jumlah penduduk produktif (15 - 64 tahun) dikali 100, menunjukkan hasil 40,21%. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 40 orang usia tidak produktif, hasil ini termasuk baik.

Data pada tabel dibawah merupakan pengelompokan umur dalam 5 tahunan.

Tabel 3.4
Komposisi Penduduk Menurut Umur

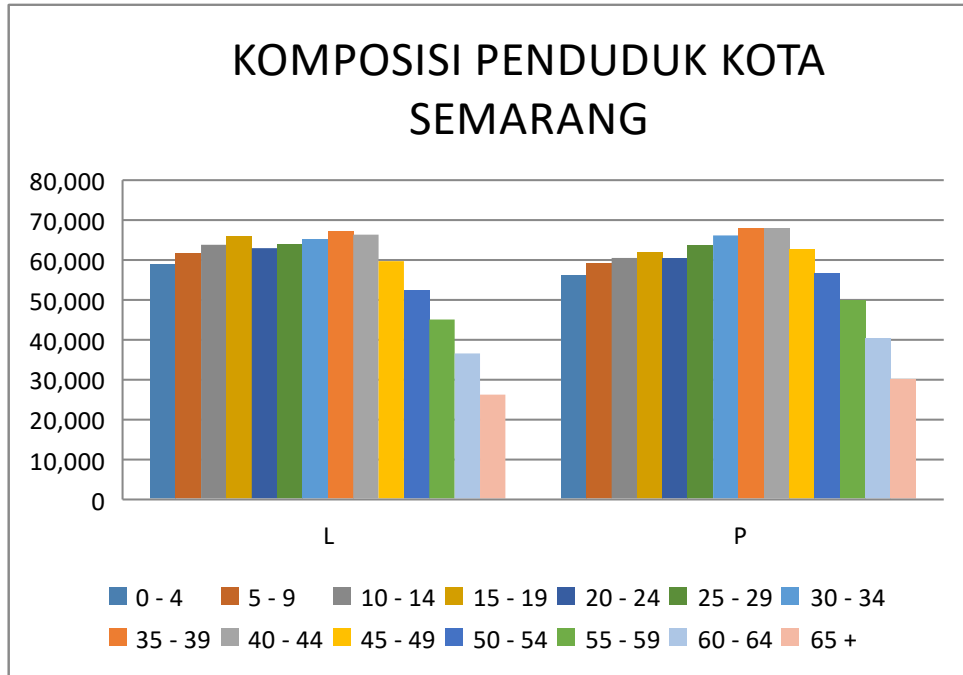
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
0 - 4	59.101	56.283	115.384
5 - 9	61.865	59.196	121.061
10 - 14	63.815	60.517	124.332
15 - 19	65.937	61.897	127.834
20 - 24	62.965	60.391	123.356
25 - 29	64.097	63.745	127.842
30 - 34	65.280	66.154	131.434
35 - 39	67.209	68.102	135.311
40 - 44	66.353	68.052	134.405
45 - 49	59.709	62.734	122.443
50 - 54	52.471	56.642	109.113
55 - 59	45.089	50.074	95.163
60 - 64	36.590	40.450	77.040
65 +	26.271	30.137	56.408
Jumlah	796.752	804.374	1.601.126

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Komposisi penduduk menurut umur ditunjukkan dalam grafik dibawah ini.

Grafik 3.2

Komposisi Penduduk Menurut Umur



Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

BAB IV

PROFIL GENDER

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.⁶ Yang berarti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup.

Menurut BPS tolak ukur skor IPM dibagi dalam 4 kelompok :

1. Sangat tinggi, skor IPM diatas 80
2. Tinggi, skor IPM antara 70 dan 80
3. Sedang, skor IPM antara 60 dan 70
4. Rendah, skor IPM dibawah 60

Merujuk pada standar yang berlaku dalam penghitungan skor IPM, maka Kota Semarang masuk dalam kategori IPM tinggi, karena nilainya sudah diatas angka 80, artinya kualitas hidup laki-laki dan perempuan di Kota Semarang baik. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
IPM Menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang
Tahun 2020-2022

Kota	Jenis Kelamin					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Semarang	85,22	85,63	86,15	81,38	81,92	82,64

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Dari data di atas menunjukkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat di Kota Semarang, tetapi masih terjadi kesenjangan angka

⁶ <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

IPM laki-laki dengan IPM perempuan baik tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk Kota Semarang IPM laki-laki tahun 2020 sebesar 85,22; tahun 2021 sebesar 85,63 dan tahun 2022 sebesar 86,15. Sedangkan IPM perempuan di Kota Semarang sebesar 81,38 untuk tahun 2020; tahun 2021 sebesar 81,92 dan tahun 2022 sebesar 82,64 yang berarti angka pencapaiannya lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Realita di lapangan menunjukkan masih terjadi kesenjangan di mana perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki baik di bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan / ekonomi dan lainnya. Bisa juga dikatakan penduduk laki-laki masih lebih banyak mendapatkan manfaat hasil pembangunan daripada perempuan.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG memiliki komponen pembentukan yang menentukan nilai dari IPG. Komponen pembentukan tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM yakni komponen dari dimensi kesehatan, pengetahuan dan ekonomi. Dari aspek kesehatan, kesenjangan gender dapat dilihat dari persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Dari aspek pengetahuan, kesenjangan gender dapat terlihat dari Angka Buta Huruf (ABH) seta Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tiga jenjang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA/ sederajat. Dari aspek ekonomi, kesenjangan gender dapat terlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sedangkan rasio jenis kelamin dan rasio jenis kelamin saat melahirkan merupakan indikator yang dapat menjelaskan orientasi gender.⁷

⁷Pemodelan Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Pemodelan Regresi Nonparametrik Spline di Indonesia, Nurul Fajriyyah dan I Nyoman Budiantara, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol.4, No.2, 2015

Sedangkan nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dibawah ini terdapat tabel penunjuk IPG di Kota Semarang selama 3 tahun terakhir.

Tabel 4.2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Semarang
Tahun 2020-2022

Kota	IPG		
	2020	2021	2022
Semarang	95,49	95,67	95,93

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Untuk IPG Kota Semarang tahun 2020 sebesar 95,49 dan naik di tahun 2021 yaitu sebesar 95,67 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 sebesar 95,93, artinya di tahun 2022 terdapat kesenjangan gender pada hasil pembangunan sebesar 4,07 yang seharusnya bernilai 100. Adanya kesenjangan tersebut masih menunjukkan belum maksimalnya peran perempuan diberbagai sector kehidupan, sebagai tenaga kerja profesional dan belum optimalnya sumbangan pendapatan perempuan.

Realita di Kota Semarang terlihat bahwa perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga keterwakilan dalam berpolitik. Hal ini mempengaruhi secara langsung pada tercapainya kesetaraan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi.

Pengukuran IDG bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan dapat memainkan peranannya dan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Ada tiga komponen dalam pengukuran IDG yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

a. IDG berdasar Kesenjangan terhadap laki-laki

Tabel dibawah menunjukkan angka IDG di Kota Semarang selama tahun 2020 hingga tahun 2022

Tabel 4.3
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Semarang
Tahun 2020-2022

Kota	IDG berdasar Kesenjangan Terhadap Laki-laki		
	2020	2021	2022
Semarang	74,67	73,64	73,93

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Data diatas menunjukkan bahwa IDG Kota Semarang untuk tahun 2020 sebesar 74,67; tahun 2021 sebesar 73,64 dan tahun 2022 sebesar 73,93. adanya kenaikan di tahun 2022 menunjukkan bahwa peran perempuan Kota Semarang di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan meningkat.

Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar Kota Semarang diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
IDG Berdasarkan Peran Perempuan
di Kota Semarang

Kabupaten / Kota	[IDG] Indeks Pemberdayaan Gender		
	2020	2021	2022
Kabupaten Demak	66.85	66.83	67.82
Kabupaten Semarang	75.40	78.35	75.78
Kabupaten Kendal	76.96	76.95	77.05
Kota Semarang	74.67	73.64	73.93

Sumber : <https://jawatengah.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Untuk IDG Kota Semarang di tahun 2022 masih berada di bawah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal yang berarti keterlibatan perempuan Kota Semarang dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan perempuan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.

b. IDG berdasar peran perempuan di parlemen

Tabel 4.5
IDG Berdasar Peran Perempuan di Parlemen

Kota	(IDG) Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)		
	2020	2021	2022
Semarang	20,41	18,75	18,00

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Data diatas menunjukkan keterlibatan perempuan di Kota Semarang ditinjau dari peran perempuan dalam politik dan pengambil keputusan. IDG Kota Semarang menunjukkan prosentase tidak lebih dari 21% yaitu di tahun 2020 yaitu sebesar 20,41%; tahun 2021 sebesar 18,75% dan tahun 2022 menjadi 18,00%.

Penurunan ini menunjukkan makin berkurangnya peran perempuan di ranah politik dan pengambil keputusan. Beberapa hal yang menyebabkan kecilnya peran perempuan baik di Kota Semarang maupun kota/kabupaten pada umumnya dikarenakan masih banyaknya perempuan yang belum menyadari hak-hak konstitusionalnya, budaya patriarki masih kuat dan dukungan masyarakat yang minim terhadap calon pemimpin perempuan, dan adanya politik uang yang menghambat majunya perempuan di kancah politik.

Keterlibatan perempuan di parlemen di Kota Semarang dibanding wilayah sekitar Kota Semarang akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6

Perbandingan Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kota Semarang dengan Kabupaten sekitarnya

Kabupaten / Kota	[IDG] Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Demak	12.00	12.00	12.00
Kabupaten Semarang	18.37	22.00	18.00
Kabupaten Kendal	24.44	24.44	24.44
Kota Semarang	20.41	18.75	18.00

Sumber : <https://jawatengah.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Data diatas menunjukkan posisi keterlibatan perempuan Kota Semarang di parlemen lebih rendah dibandingkan wilayah lain yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, tetapi lebih tinggi dibanding Kabupaten Demak.

4. Pengeluaran Per-Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan (BPS, 2008). Maksud dari rumah tangga sendiri adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Dimana pengeluaran perkapita dipengaruhi oleh pendapatan perkapitanya. Asumsi ini menjelaskan pada

saat pendapatan seseorang semakin meningkat maka semakin tinggi pula pengeluarannya.

Data dibawah berbicara mengenai pengeluaran perkapita dalam ranah gender.

Tabel 4.7
Pengeluaran per Kapita (Ribuan Rupiah)

Kota	Pengeluaran per Kapita (Ribuan Rupiah)		
	2020	2021	2022
Semarang	15.243	15.425	16.047

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Selasa, 29/3/2023)

Data pengeluaran per kapita untuk tahun 2020 adalah Rp. 15.243.000; tahun 2021 Rp. 15.425.000 dan tahun 2022 Rp. 16.047.000. Tampak data diatas menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, yang artinya makin besar pengeluaran dalam rumah tangga di Kota Semarang dan mencerminkan kian naik pendapatan warga kota Semarang.

Sedangkan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin terlihat pada data di bawah ini.

Tabel 4.8
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin
(Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)

Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Semarang	16.128	16.436	17.115	14.287	14.442	14.908

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Dalam tabel diatas secara garis besar terjadi perbedaan pengeluaran per kapita antara perempuan dengan laki-laki di Kota Semarang. Dapat dilihat di Kota Semarang untuk tahun 2022 pengeluaran per kapita perempuan selama 1 tahun sebesar Rp. 14.908.000, sedangkan untuk laki-laki sebesar Rp. 17.115.000. artinya pengeluaran

per kapita laki-laki lebih besar daripada perempuan. Asumsi ini menjelaskan pada saat pendapatan seseorang semakin meningkat maka semakin tinggi pula pengeluarannya, dan di Kota Semarang pendapatan laki-laki untuk tahun 2022 lebih baik daripada perempuan. Selain itu variabel ini menggambarkan kemampuan ekonomi perempuan yang mana semakin tinggi pengeluaran per kapita perempuan maka semakin mudah akses mereka terhadap fasilitas kesehatan maupun nutrisi yang diasup ketika masa kehamilan dan pasca persalinan.

Tabel 4.9
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Menurut Jenis Kelamin
(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Kabupaten / Kota	PPP					
	L			P		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kabupaten Semarang	12.882	12.976	13.435	11.733	11.843	12.211
Kabupaten Kendal	14.842	15.078	15.574	10.567	10.740	11.060
Kabupaten Demak	14.597	14.840	15.481	8.613	8.705	9.077
Kota Semarang	16.128	16.436	17.115	14.287	14.442	14.908

Sumber : <https://jawatengah.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar yaitu : Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak di tahun 2022, PPP Kota Semarang menunjukkan nilai yang paling tinggi baik PPP laki-laki maupun perempuan. Dapat dikatakan bahwa semakin besar pengeluaran per kapita maka tingkat kemiskinan menurun. Sehingga apabila tingkat kemiskinan turun maka tingkat kesejahteraan masyarakat naik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan Kota Semarang lebih baik daripada kabupaten sekitar.

5. Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi yang disebut penduduk miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Ada beberapa konsep hitung mengenai garis kemiskinan :

- 1) Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKNM). penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- 2) Garis kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari). paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- 3) Garis kemiskinan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaaan dan 47 jenis konodiri di pesedaan.

Tabel 4.10

Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang

Kota	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (Ribuk Jiwa)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Semarang	522.691	543.929	589.598	79.58	84.45	79.87

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Dilihat dari garis kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang dalam kurun waktu 2020 - 2022 menunjukkan peningkatan seiring dengan kenaikan bahan pangan sepanjang 3 tahun tersebut. Dari tahun 2020 sebesar Rp. 522.691 per kapita menjadi Rp. 589.598 per kapita.

Sedangkan ditinjau dari jumlah penduduk miskin sepanjang tahun 2020 - 2022 memperlihatkan data angka sebesar 79.58 ribu jiwa di tahun 2020;

mengalami kenaikan di tahun 2021 yaitu 84.45 ribu jiwa dan tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah 79.87 ribu jiwa. Kenaikan penduduk miskin pada tahun 2021 tersebut merupakan efek yang ditimbulkan karena adanya pandemi covid. Tidak hanya Kota Semarang saja yang mengalami kenaikan tetapi di seluruh Indonesia juga terjadi hal tersebut.

Jika diperlihatkan garis kemiskinan Kota Semarang dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11

**Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang
Dan Sekitarnya**

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kabupaten Semarang	404.455	416.395	459.151	79.88	83.61	78.60
Kabupaten Demak	432.533	445.176	471.818	146.87	151.74	143.01
Kabupaten Kendal	396.691	407.387	433.864	97.49	100.00	93.03
Kota Semarang	522.691	543.929	589.598	79.58	84.45	79.87

Sumber : <https://jawatengah.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Data diatas menunjukkan bahwa garis kemiskinan terbanyak adalah Kota Semarang dengan jumlah Rp. 589.598 per kapita dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 79.87 ribu jiwa lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Kendal dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 433.864 sedangkan jumlah penduduk miskin lebih tinggi dari Kota Semarang yaitu sebanyak 93.03 ribu jiwa.

6. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Adapun AHH merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Variabel penting

yang mempengaruhi harapan hidup seseorang diantaranya : gaya hidup, akses ke fasilitas kesehatan dan status ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, Angka Harapan Hidup di Kota Semarang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12
Angka Harapan Hidup (AHH)

Kota	Angka Harapan Hidup (AHH)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Semarang	75.59	75.79	75.94	79.26	79.43	79.61

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Data di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup baik laki-laki maupun perempuan meningkat dari tahun 2020-2022. rata-rata AHH laki-laki tahun 2022 jatuh pada usia sekitar 75-76 tahun, sedangkan perempuan sebesar 79-80 tahun. Kenaikan ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, data menunjukkan bahwa AHH laki-laki lebih pendek daripada AHH perempuan, dan hal ini sesuai pendapat WHO juga yang menyatakan bahwa di seluruh dunia rata-rata wanita memang mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Jika merujuk pada konsep kesehatan, wanita lebih tahan terhadap kerusakan kromosom karena memiliki cadangan kromosom X sedangkan laki-laki tidak.

7. Perempuan dan Kesehatan

a) Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan ibu dan anak menjadi isu strategis bagi pembangunan berkelanjutan karena kualitas anak semenjak ibu hamil, melahirkan dan menyusui menjadi syarat penentu keberlangsungan SDM yang berkualitas. Pentingnya pengawasan dan perlindungan kesehatan ibu anak ini sesuai dengan Pasal 47 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pemerintah Daerah Kota Semarang juga menyadari pentingnya kesehatan ibu dan anak sehingga dituangkan dalam Visi dan Misi Kota Semarang. Pada misi yang pertama berbunyi: Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan. Hal ini membuktikan bahwa Kota Semarang berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM-nya melalui perlindungan kesehatan ibu dan anak. Berikut ditunjukkan data hasil pelayanan pemerintah terhadap kesehatan ibu dan anak.

Tabel 4.13
Kesehatan Ibu dan Anak
Tahun 2022

Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
Angka Kematian Ibu (AKI)	67,25	/100.000 KH	Target pemerintah 183/100.000KH
Jumlah Kasus Kematian Ibu : Hamil	5	org	
Jumlah Kasus Kematian Ibu : Melahirkan	0	org	
Jumlah Kasus Kematian Ibu : Nifas	10	org	
Jumlah kunjungan ibu hamil	22.040	org	
Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan	22.040	org	
Jumlah kunjungan neonatal	22.040	org	
Jumlah Persalinan Yang Di Tolong Non Nakes	0	org	
Jumlah Kasus Kematian Bayi	125	org	
Jumlah Kasus Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	499		L = 255 P= 244
Jumlah Kasus Kematian Balita	22	org	
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk	24	org	
Jumlah Kasus Balita Stunting	1.465	org	
Jumlah balita dipantau tumbuh kembang	89.239		L= 44.315 P = 44.924
Cakupan balita dipantau tumbuh kembang	100	%	
Capaian Imunisasi Dasar Lengkap	102,3	%	
Jumlah bayi yang diimunisasi lengkap	27.530	org	
Capaian imunisasi Baduta	74,6	%	
Jumlah Baduta yang diimunisasi lengkap	28.442	org	
Capaian ASI Eksklusif	73,2	%	Target renstra 65,60%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Data diatas menunjukkan bahwa kesadaran ibu akan kesehatan meningkat, khususnya ibu hamil dalam menjaga kehamilannya, yang diperlihatkan pada cakupan persalinan di faskes; cakupan kunjungan bumil; dan cakupan kunjungan neonatal sudah mencapai 100%.

Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 67,25/100.000KH lebih kecil daripada target pemerintah yaitu 183/100.000KH atau terdapat 15 orang ibu meninggal karena hamil dan nifas. Hal ini menunjukkan perlindungan kesehatan ibu hamil dan melahirkan di Kota Semarang baik. Dan semakin meningkat pula perlindungan kesehatan terhadap perempuan.

Kasus kematian bayi masih terjadi dengan jumlah 125 bayi. Sedangkan kasus bayi dengan berat badan lahir rendah ada 499 bayi; cakupan imunisasi bayi lengkap ada 27.530 bayi. Kasus kematian balita ada 22 anak; kasus gizi buruk ada 24 anak; balita stunting ada 1.465 anak. Masih adanya kasus pada bayi dan balita menjadi perhatian pemerintah dengan melakukan pemenuhan indikator status gizi bayi dan balita melalui program :

- a. Peningkatan cakupan keikutsertaan imunisasi lengkap
- b. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun dilaksanakan melalui program
- c. Mendorong pemberian ASI Eksklusif sehingga target tercapai lebih tinggi dari target renstra
- d. Penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap anak usia 0-24 bulan;

Puskesmas atau fasilitas kesehatan juga melakukan kegiatan pemantauan ibu hamil dengan beberapa program kegiatan, yaitu :

- a. Skrining deteksi dini prapersalinan mengenai HIV, sifilis dan hepatitis B.
B. Pelaksanaan skrining dilaksanakan pada saat kunjungan pertama bumil di layanan kesehatan, terintegrasi dengan ANC (pemeriksaan kehamilan)

- b. Penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan HIV dan sifilis; Pemberian profilaksis dilakukan pada bayi lahir dari bumil positif sebelum 24 jam.
- c. Fasilitasi untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke anak; dengan pemberian HBIG dan HB0 pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam. Hasil pada tahun 2022 adalah sebesar 146 bayi yg lahir dan diberi HBIG dan HB0 kurang dari 24 jam

b) Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Usaha ber-KB merupakan salah satu cara menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu akibat kehamilan yang dialami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Tujuan utama pemerintah melaksanakan program keluarga berencana adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan keluarga berencana diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi, dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat akan lebih meningkat.

Untuk mengetahui pentingnya keluarga berencana di Kota Semarang, maka akan dipaparkan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang masih produktif sehingga upaya mengatur kelahiran dan jumlah anak serta kelahiran disesuaikan dengan jumlah PUS.

Tabel 4.14
Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Semarang
Tahun 2022

No	Puskesmas	Jumlah	Satuan
1	Puskesmas Karangdoro	2.862	PUS
2	Puskesmas Pandanaran	2.801	PUS
3	Puskesmas Lamper Tengah	2.972	PUS
4	Puskesmas Karangayu	2.316	PUS
5	Puskesmas Lebdosari	5.454	PUS
6	Puskesmas Manyaran	6.130	PUS
7	Puskesmas Krobokan	3.575	PUS
8	Puskesmas Ngemplak Simongan	3.110	PUS
9	Puskesmas Gayamasari	9.115	PUS
10	Puskesmas Candilama	5.370	PUS
11	Puskesmas Kagok	4.284	PUS
12	Puskesmas Pegandan	6.607	PUS
13	Puskesmas Genuk	6.123	PUS
14	Puskesmas Bangetayu	14.792	PUS
15	Puskesmas Tlogosari Kulon	12.357	PUS
16	Puskesmas Tlogosari Wetan	15.737	PUS
17	Puskesmas Kedungmundu	20.501	PUS
18	Puskesmas Rowosari	7.912	PUS
19	Puskesmas Ngesrep	6.526	PUS
20	Puskesmas Padangsari	3.539	PUS
21	Puskesmas Srandol	5.692	PUS
22	Puskesmas Pudak Payung	5.791	PUS
	Total	153.566	PUS

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Data diatas menunjukkan bahwa di Kota Semarang terdapat 153.566 pasangan usia subur. PUS yang terbanyak berada di wilayah Puskesmas Kedungmundu dengan jumlah 20.501 PUS, kemudian di wilayah Puskesmas Tlogosari Wetan dengan jumlah 15.737 PUS dan wilayah

Puskesmas Bangetayu dengan jumlah 14.792 PUS. Sedangkan PUS dengan jumlah paling sedikit berada di wilayah Puskesmas Karangayu dengan jumlah 2.316 PUS.

Beberapa cara untuk mencegah ataupun menunda kehamilan salah satu caranya adalah dengan memakai kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Pemilihan alat kontrasepsi pada umumnya merupakan salah satu keputusan yang dilandasi berbagai pertimbangan dari suami dan istri.

Beberapa alat kontrasepsi yang ada saat ini seperti : IUD, MOW, MOP, implan, kondom dan pil. Berikut adalah jumlah penduduk yang telah menjadi peserta KB yang ada di Kota Semarang.

Tabel 4.15
Jumlah Peserta KB di Kota Semarang
Tahun 2022

Uraian Indikator	Jumlah		Satuan
	2021	2022	
Jumlah Pasangan Usia Subur	237.690	239.049	Psg
Jumlah Peserta KB Aktif IUD	22.591	23.669	org
Jumlah Peserta KB Aktif MOW	16.703	17.365	org
Jumlah Peserta KB Aktif MOP	668	607	org
Jumlah Peserta KB Aktif Implant	11.008	12.150	org
Jumlah Peserta KB Baru IUD	4.242	4.171	org
Jumlah Peserta KB Baru MOW	1.439	1.450	org
Jumlah Peserta KB Baru MOP	37	110	org
Jumlah Peserta KB Baru PIL	1.623	1221	org
Angka Drop Out (DO) Peserta KB Aktif	19,63	7,91	%
Angka Unmet Need	10,89	9,13	%
Persentase PB MKJP Terhadap PB Total	36,57	37,76	%

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2023

Pasangan usia subur mengalami peningkatan, dari 237.690 pasangan di tahun 2021 menjadi 239.049 pasangan di tahun 2022. sejalan dengan itu pasangan yang memakai alat kontrasepsi juga meningkat. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman pasangan terutama ibu-ibu mengenai keuntungan memakai alat KB meningkat sejalan dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai manfaat program KB akan menentukan kualitas keluarga karena dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga jarak kelahiran akan mengurangi resiko kematian bayi. Untuk kepesertaan KB, peserta KB laki-laki hanya sebanyak 717 orang, sedangkan perempuan sebanyak 59.926 orang. Hal ini juga menunjukkan kesadaran perempuan untuk ber-KB lebih tinggi daripada laki-laki.

Sedangkan alat kontrasepsi yang banyak diminati ibu-ibu yaitu KB IUD. Sebanyak 22.591 orang di tahun 2021 memakai KB IUD dan makin meningkat jumlahnya di tahun 2022 yaitu sebanyak 23.669 orang. Menurut pemakai alat kontrasepsi IUD, alat tersebut menguntungkan karena waktu pemakaian yang lama, banyak yang merasa cocok dan aman.

Sedangkan pemakai alat kontrasepsi laki-laki (MOP) masih sedikit jumlahnya, karena kurangnya pengetahuan PUS mengenai MOP itu sendiri, pemasangan alat kontrasepsi dianggap kurang lazim untuk pria, dan mereka beranggapan bahwa pemakaian alat kontrasepsi adalah tanggungjawab seorang istri dan keputusan diserahkan pada istri.

Apabila dilihat dari varian alat kontrasepsi yang lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki menunjukkan bahwa perempuan menanggung resiko lebih besar dalam penggunaan alat kontrasepsi dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan beban ketidaknyamanan perempuan masih tinggi dengan kata lain perlakuan terhadap tubuh perempuan masih dominan daripada laki-laki.

Sedangkan angka unmet need menunjukkan angka 9,13%, artinya besaran angka tersebut menunjukkan proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang memilih tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan-anak atau mereka yang tidak menginginkan pemasangan alat kontrasepsi karena resiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk.

c) Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat tergerak untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang tinggi sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. dibawah terdapat data mengenai jumlah tenaga kesehatan pilah gender yang ada di Kota Semarang.

Data diatas menunjukkan tenaga kesehatan lebih dominan diperankan oleh perempuan daripada laki-laki, tetapi untuk posisi dokter spesialis memiliki jumlah dokter laki-laki lebih banyak dari perempuan, yaitu 309 dokter spesialis laki-laki dan 290 dokter spesialis perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peluang kerja di bidang kesehatan lebih terbuka untuk kaum perempuan daripada laki-laki. Pelayanan kesehatan banyak didominasi perempuan karena lebih sabar dan telaten menghadapi pasien.

Tabel 4.16
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Semarang
Tahun 2022

No	Tenaga Kesehatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Spesialis	309	290	599
2	Dokter Umum	452	899	1.351
3	Dokter Gigi Spesialis	20	31	51
4	Dokter Gigi	63	240	303
5	Perawat	1.951	4.735	6.686
6	Bidan	0	897	897
7	Apoteker	45	249	294
8	Teknis kefarmasian	102	942	1.044
9	Kesehatan masyarakat	40	139	179
10	Sanitarian	40	77	117
11	Nutrisi	29	278	307
12	Keterampilan fisik	96	156	252
13	Ketehnikisan medis	163	528	691
14	Teknis biomedika	344	629	973
15	Ahli teknologi lab medik	112	443	555

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

8. Perempuan dan Pendidikan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan perlindungan negara terhadap masa depan anak melalui pendidikan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. Negara meyakini bahwa karena keberhasilan pembangunan suatu negara akan terwujud salah satunya melalui kepemilikan sumber daya yang berkualitas.

Kota Semarang juga menerapkan peningkatan SDM melalui peningkatan mutu pendidikan baik sarana maupun prasarana agar seluruh anak Kota Semarang memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak agar mereka menjadi SDM berkualitas di masa depan. Hal ini terkandung dalam misi ke satu yang mana pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.

a) APK, APM dan APS.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Berikut tersaji gambaran pendidikan di Kota Semarang melalui penghitungan APK, APM dan APS.

Tabel 4.17

APK Siswa TK, TKLB, RA di Kota Semarang

Tahun 2022/2023

Penduduk Usia 3-6th	Siswa TK+TKLB+RA			Siswa PAUD	APK
	L	P	Jumlah		
68.057	21.168	20.205	41.373	15.011	82,85%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2023

Dari data APK diatas menunjukkan bahwa APK Siswa TK, TKLB, RA di Kota Semarang Tahun 2022/2023 sebesar 82,85%, artinya 82,85% anak sudah masuk menjadi siswa TK, TKLB, RA dan ada 17,15% belum sekolah. Prosentase APK lebih tinggi dari tahun ajaran sebelumnya yaitu sebesar 75,91%, artinya kesadaran orangtua menyekolahkan anak dimulai dari PAUD meningkat.

Tabel 4.18

APK, APM, APS Siswa SD Sederajat di Kota Semarang

Tahun 2022/2023

Penddk Usia 7- 12th	Siswa			Siswa Usia 7- 12th	Prosentase (%)		
	L	P	JML		APK	APM	APS
160.018	85.016	80104	165.120	144.675	103,19	90,41	107,38

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2023

Untuk jenjang pendidikan SD, nilai APKnya adalah 103,19% artinya adalah ada 100% anak usia SD yang masuk sekolah dan jumlah murid SD/Sederajat yang berusia kurang dari 7th dan lebih dari 12th ada 3,19%.

Sedangkan APM SD ada 90,41% artinya anak yang sudah masuk SD dengan usia 7th ada 90,41% dan masih ada anak usia 7th yang

belum masuk SD sebesar 9,59%. Dan untuk APS tingkat SD sebesar 107,38%

Tabel 4.19

APK, APM, APS Siswa SMP Sederajat di Kota Semarang

Tahun 2022/2023

Penddk Usia 13- 15th	Siswa			Siswa Usia 13- 15th	Prosentase		
	L	P	Jml		APK	APM	APS
80.780	40.045	38.706	78.760	59.058	97,50	73,11	97,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2023

Untuk jenjang pendidikan SMP, nilai APKnya adalah 97,50% artinya adalah ada anak yang belum masuk SMP sebesar 2,50%.

Sedangkan APM SMP ada 73,11% artinya anak yang sudah masuk SMP dengan usia 13th ada 73,11% dan masih ada anak usia 13th yang belum masuk SMP sebesar 26,89%. Dan untuk APS tingkat SMP sebesar 97,23%.

Tabel 4.20

APK dan APM Siswa SMA Sederajat di Kota Semarang

Tahun 2020/2021

Penddk Usia 16-18th BPS	Siswa	Siswa Usia 16-18th	BPS	
			APK	APM
82.420	76.422	57.341	92,75	69,57%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2021

Untuk jenjang pendidikan SMA, nilai APKnya adalah 92.75% artinya adalah ada anak yang belum masuk SMA sebesar 7.25%.

Sedangkan APM SMA ada 69.57% artinya anak yang sudah masuk SMA dengan usia 16th ada 69.57% dan masih ada anak usia 16th yang belum masuk SMA sebesar 30.43%.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Tabel 4.21**Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin**

Kota	L			P		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Semarang	15.72	15.73	15.74	15.23	15.24	15.53

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/40/191/1>, 21 Juni 2023

HLS Semarang pada tahun 2022 untuk laki-laki sebesar 15.74 tahun. Artinya secara rata-rata anak laki-laki usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang bersekolah selama 15.74 tahun atau setara dengan S1. Sedangkan untuk perempuan di Kota Semarang HLSnya sebesar 15.53 tahun, artinya secara rata-rata anak perempuan usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang bersekolah selama 15.53 tahun atau setara dengan S1. Hasil HLS laki-laki dan perempuan di Kota Semarang menunjukkan waktu bersekolah yang hampir setara.

c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Yang dimaksud rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi terkait dengan : 1) partisipasi sekolah; 2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; 3) ijazah tertinggi yang dimiliki; 4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Kegunaan dari RLS adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal, karena ada korelasi antara lama sekolah yang ditempuh penduduk dengan kualitas talenta sumber daya di wilayah tersebut.

Tabel 4.22**Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin**

Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Semarang	11.42	11.51	11.53	10.16	10.44	10.46

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> (Kamis, 8/6/2023)

Data diatas menunjukkan secara garis besar RLS perempuan lebih rendah dibanding RLS laki-laki. Untuk tahun 2022 di Kota Semarang RLS perempuan adalah 10,46 atau setara dengan kelas 1 SMA, sedangkan RLS laki-laki adalah 11,53 atau setara dengan kelas 2 SMA. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan dalam pencapaian rata-rata lama sekolah antara perempuan dengan laki-laki. Yang artinya juga bahwa kualitas talenta sumber daya perempuan masih lebih rendah sedikit daripada laki-laki. Belum maksimalnya RLS ini ditengarai menjadi penyebab masih tingginya angka pernikahan anak di Kota Semarang.

d) Akses terhadap Informasi dan Tehnologi

Untuk mendukung keterbukaan informasi teknologi maka Kota Semarang mempermudah masyarakat mengakses informasi dan teknologi dengan melakukan sebaran bandwidth internet di kantor pemerintahan, tempat pelayanan umum dan sekolah. Selain itu pemerintah kota mengajak warga terutama anak-anak untuk menggunakan internet sehat. Di sepanjang tahun 2022, pemerintah Kota Semarang data Diskominfo telah melakukan sebaran bandwidth internet sebanyak 159 titik. Tidak ada informasi sebaran informasi laki-laki dan perempuan dalam mengakses informasi dan teknologi.

e) Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Tenaga pendidik sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sehingga jumlah tenaga pendidik sedapat mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah mengenai rasio tenaga pendidik terhadap anak yang dididik.

Tabel 4.23**Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang
Tahun Ajaran 2022/2023**

No	Guru	L	P	Jumlah
1	PNS Fungsional Guru	798	2.071	2.869
2	PNS Kepala Sekolah	125	230	355

Sumber, BKPP Kota Semarang, 2023

Merujuk pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa jumlah guru PNS yang terbanyak adalah perempuan dengan jumlah 2.071 orang, sedangkan guru laki-laki berjumlah 798 orang. Dengan total keseluruhan 2.869 orang.

Sedangkan jumlah kepala sekolah dengan status PNS di Kota Semarang berjumlah 355 orang dengan perbandingan kepala sekolah perempuan berjumlah 230 dan laki-laki berjumlah 125 orang. Menurut penelitian, kondisi banyaknya perempuan yang menjadi guru dan kepala sekolah daripada laki-laki disebabkan karena :

1. Wanita dipandang sebagai sosok yang tepat menjadi guru karena nalurnya sebagai seorang ibu, yang telaten mengasuh anak.
2. Menyangkut kesejahteraan. Laki-laki disarankan untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi karena harus menopang ekonomi keluarga yang utama, karena masyarakat masih beranggapan kalau gaji guru masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Masyarakat masih memandang bahwa profesi guru untuk laki-laki kurang bergengsi dan merupakan pilihan ke sekian karena tidak ada profesi lain yang dilakukan.

Berikut tersaji data mengenai jumlah anak didik yang ada di Kota Semarang tahun ajaran 2022/2023.

Tabel 4.24
Jumlah Anak Didik di Kota Semarang
Tahun Ajaran 2022/2023

No	Wilayah	Total		
		L	P	Jml
1	Kec. Tugu	3.986	3.224	7.210
2	Kec. Gajah Mungkur	6.732	6.045	12.777
3	Kec. Gayamsari	6.671	6.049	12.720
4	Kec. Candisari	7.121	6.322	13.443
5	Kec. Semarang Utara	8.024	6.934	14.958
6	Kec. Gunung Pati	7.950	7.390	15.340
7	Kec. Ngaliyan	8.957	8.859	17.816
8	Kec. Genuk	9.454	8.976	18.430
9	Kec. Mijen	9.918	9.074	18.992
10	Kec. Semarang Timur	10.005	10.543	20.548
11	Kec. Semarang Tengah	11.660	10.875	22.535
12	Kec. Tembalang	12.309	11.211	23.520
13	Kec. Semarang Barat	14.038	13.240	27.278
14	Kec. Semarang Selatan	13.854	13.438	27.292
15	Kec. Banyumanik	14.488	13.620	28.108
16	Kec. Pedurungan	14.949	14.843	29.792
Total	Total	160.116	150.643	310.759

Sumber : DAPO, Kemendikbud Kota Semarang, 2023

Dilihat dari total seluruh peserta didik di Kota Semarang terdapat 310.759 siswa. Jumlah siswa/i tahun ajaran 2022/2023 di Kota Semarang

ada sejumlah 160.116 siswa dan 150.643 siswi. Anak didik terbanyak tinggal di wilayah Kecamatan Pedurungan dengan jumlah 29.792 siswa/i, kemudian di wilayah Kecamatan Banyumanik dengan jumlah 28.108 siswa/i dan Kecamatan Semarang Selatan dengan jumlah 27.292 siswa/i. Sedangkan anak didik paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Tugu dengan jumlah 7.210 siswa/i.

Kecamatan Pedurungan yang memiliki siswa paling banyak sebanding dengan jumlah sekolah yang berada di wilayah tersebut. Ada : Pos PAUD 157 unit; SD 49 unit; SMP 16 unit; SMA 5 unit; SMK 6 unit; dan SLB 1 unit.

9. Perempuan dan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Komunikasi

Kesempatan kerja atau tersedianya lapangan kerja baru merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi sosial daerah.

Sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi sosial, target kesetaraan gender yang harus dicapai pada tahun 2030 yaitu harus mengakhiri segala bentuk diskriminasi pada perempuan, menghentikan praktek yang membahayakan perempuan (pernikahan dini, kekerasan seksual), menjamin partisipasi penuh perempuan dalam bidang politik (pemerintah, parlemen), memberi layanan kesehatan yang optimal pada wanita (kesehatan reproduksi, kesehatan dan keselamatan ibu dan anak), memperluas penggunaan dan akses teknologi informasi bagi perempuan. Berikut gambaran posisi perempuan Kota Semarang di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

Tabel 4.25
Penduduk Usia Kerja Di Kota Semarang
Tahun 2022

No	Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	Bekerja	557,795	436,296	994,091	orang
2	Pengangguran	61,368	20,368	81,736	orang
3	Bukan Angkatan Kerja	117,643	322,727	440,370	orang
Jumlah		736,806	779,391	1,516,197	orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Menurut data di atas terdapat 557.795 orang laki-laki dan 436.296 orang perempuan yang bekerja. Gambaran tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan jumlah tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan. Artinya akses untuk mendapatkan pekerjaan lebih terbuka untuk laki-laki daripada perempuan. Gambaran data itu bisa dilihat disamping peluang kerja lebih banyak untuk laki-laki, juga banyak perempuan memilih pekerjaan di sektor informal karena dapat bekerja sekaligus mengurus rumah tangga.

Sedangkan merujuk pada data pengangguran, terdapat banyak jumlah pengangguran laki-laki yaitu sebanyak 61.368 orang dibandingkan perempuan dengan jumlah 20.368 orang. Kesenjangan yang besar ini bukan berarti banyak pengangguran laki-laki, melainkan ada perempuan yang menyatakan bahwa status ibu rumah tangga dimasukkan sebagai pekerjaan utama perempuan, sehingga tampak perempuan yang menganggur lebih kecil jumlahnya daripada laki-laki.

Sedangkan yang dimaksud penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Dari hal tersebut, terdapat 117.643 orang laki-laki dan 322.727 orang perempuan.

Tabel 4.26
Tingkat Kesempatan Angkatan Kerja
Tahun 2022

Uraian		L	P	Jumlah	Ket
Bekerja	Angkatan kerja	619.163	456.664	1.075.827	orang
	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	9.911	4.460	14.371	%
	TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)	90.089	95.540	185.629	%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Jumlah angkatan kerja di Kota Semarang menunjukkan data 619.163 orang laki-laki dan 456.664 orang perempuan. Kesenjangan yang cukup besar antara jumlah laki-laki angkatan kerja dengan jumlah perempuan angkatan kerja ditunjukkan pada data diatas.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal 35 jam seminggu. Penduduk bekerja dengan status pengangguran terbuka terdapat 14,371 % yang terdiri dari 9,911% laki-laki dan 4,460% perempuan.

Sedangkan kesempatan kerja yang ada di Kota Semarang untuk laki-laki sebesar 90,089% dan perempuan sebesar 95,540% yang artinya peluang tenaga kerja perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di Kota Semarang lebih besar dibandingkan peluang tenaga kerja laki-laki.

Adapun di Kota Semarang memiliki beberapa jenis pekerjaan yang umum dilakukan warga sebagai mata pencaharian. Untuk itu dibawah ini dipaparkan data mengenai penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kota Semarang.

Tabel 4.27
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Tahun 2022

No	Lap. Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	12,324	2,193	14,517
2	Manufaktur	184,810	96,233	281,043
3	Jasa	360,661	337,870	698,531
	Jumlah	557,795	436,296	994,091

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Data menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di bidang pertanian ada 12.324 laki-laki dan 2.193 perempuan. Sedangkan yang bekerja di bidang manufaktur ada 184.810 laki-laki dan 96.233 perempuan. Penduduk usia kerja baik laki-laki maupun perempuan yang paling banyak bekerja berada di bidang jasa dengan jumlah 360.661 laki-laki dan 337.870 perempuan. Bila dilihat dari peminatan bekerja yang terbanyak jumlahnya ada di bidang jasa; manufaktur dan terakhir pertanian. Hal ini wajar karena Kota Semarang bukan kota yang memiliki lahan luas untuk pertanian melainkan kota besar yang memiliki banyak pabrik dan perusahaan jasa.

Tabel 4.28
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Tahun 2022

No	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	104,510	96,055	200,565
2	Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	25,913	26,743	52,656
3	Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	19,119	5,267	24,386
4	Buruh/karyawan/pegawai	354,999	259,050	614,049
5	Pekerja bebas	38,356	12,538	50,894
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	14,898	36,643	51,541
	Jumlah	557,795	436,296	994,091

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk usia kerja yang bekerja dengan berusaha sendiri ada 200.565 yang mana terdapat 104.510 laki-laki dan 96.056 perempuan. Pekerja yang berusaha dibantu pekerjaan tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar ada 25.913 laki-laki dan 26.743 perempuan. Untuk pekerja yang berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar terdapat 19.119 laki-laki dan 5.267 perempuan dengan total jumlah 24.386 orang pekerja.

Pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai ada 354.999 laki-laki dan 259.050 perempuan dengan total 614.049 orang pekerja. Sedangkan pekerja bebas ada 38.356 laki-laki dan 12.538 perempuan. Dan pekerja keluarga/tidak dibayar terdapat 14.898 laki-laki dan 36.643 perempuan dengan total 51.541 orang pekerja.

Tabel 4.29
Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Laki- laki			Perempuan			Jumlah		
	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
SD	83,498	3,511	87,009	76,274	2,380	78,654	159,772	5,891	165,663
SMP	78,573	25,262	103,835	61,530	2,681	64,211	140,103	27,943	168,046
SMA Umum	136,015	19,936	155,951	89,070	4,181	93,251	225,085	24,117	249,202
SMA Kejuruan	136,377	6,518	142,895	84,451	7,611	92,062	220,828	14,129	234,957
Diploma I/II/III	19,926	740	20,666	41,206	869	42,075	61,132	1,609	62,741
Universitas	103,406	5,401	108,807	83,765	2,646	86,411	187,171	8,047	195,218
Total	557,795	61,368	619,163	436,296	20,368	456,664	994,091	81,736	1,075,827

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Dilihat dari data diatas memperlihatkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan pekerja yang terbanyak berpendidikan SMA baik SMA Umum maupun SMA Kejuruan. Angkatan kerja laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada jenjang pendidikan SMA baik SMA Umum maupun SMA Kejuruan. Tetapi untuk status laki-laki pengangguran terbanyak memiliki pendidikan SMP dan SMA umum, sedangkan perempuan pengangguran memiliki pendidikan SMA kejuruan dan SMA umum.

a) Koperasi

Potensi perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga penting untuk didorong dan diteruskan, mengingat jumlah penduduk perempuan hampir setara dengan jumlah penduduk laki-laki. Kekuatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga juga diperkuat dengan fakta

bahwa dalam sektor usaha mikro banyak digeluti oleh kaum perempuan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Di Kota Semarang perempuan yang mengelola usaha mikro ada 20.251 orang sedangkan laki-laki yang mengelola usaha mikro ada 9.360 orang. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang besar untuk berkembang di dunia usaha mikro dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 4.30
Perempuan dan Koperasi
Tahun 2022

NO	Uraian Indikator	L	P	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Koperasi Aktif			561	Kop
2	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	81,251	74,917	156,168	Org
3	Jumlah Manajer Koperasi	148	81	229	Org
4	Jumlah Karyawan Koperasi	1,205	868	2,073	Org
5	Jumlah Koperasi Wanita / Perempuan			38	Kop
6	Jumlah Anggota Koperasi Wanita / Perempuan	14	5,408	5,422	Org
7	Jumlah Usaha Mikro	9,360	20,251	29,611	Usaha
8	Jumlah Usaha kecil	0	0	0	Usaha
9	Jumlah Usaha Menengah	0	0	0	Usaha
10	Jumlah Pelaku Usaha Mikro	9,360	20,251	29,611	Org
11	Jumlah Pelaku Usaha Kecil	0	0	0	Org
12	Jumlah Pelaku Usaha Menengah	0	0	0	Org
13	Jumlah UMKM Binaan	9,360	20,251	29,611	Usaha
14	Jumlah Pelaku (Pemilik) UMKM Binaan	9,360	20,251	29,611	Org
15	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Binaan	11,706	21,421	33,127	Org
16	Jumlah Bank sampah			500	usaha

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Jumlah koperasi aktif yang ada di Kota Semarang ada 561 koperasi, yang mana jumlah anggota koperasi aktif ada 156.168 orang yang terdiri dari 81.251 laki-laki dan 74.917 perempuan. Sedangkan di level manager

koperasi ada 229 orang dengan pembagian 148 laki-laki dan 81 perempuan. Untuk jumlah karyawan koperasi ada 2.073 orang yang terdiri dari 1.205 laki-laki dan 868 perempuan.

Koperasi wanita adalah koperasi yang anggota dan pengurusnya adalah perempuan. Terbentuknya koperasi perempuan bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan mengatasi masalah ekonomi dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa koperasi wanita membantu anggotanya memenuhi kebutuhan sosial, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan peran wanita sebagai pebisnis. Di Semarang terdapat koperasi wanita yang berjumlah 38 koperasi dengan anggota laki-laki sebanyak 14 orang dan anggota perempuan sebanyak 5.408 orang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dimaksud Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). di Kota Semarang terdapat 9.360 usaha mikro yang dikelola oleh laki-laki dan 20.251 usaha mikro yang dikelola oleh perempuan. Secara umum usaha mikro diminati perempuan karena tidak membutuhkan keahlian khusus, bisa *part time*, fleksibel, dapat dilakukan di rumah, *income* dalam waktu singkat, tidak membutuhkan modal besar. Selain itu peran perempuan dalam usaha mikro tidak mempengaruhi peran gender laki-laki dengan perempuan dalam rumah tangga, tetapi kondisi ini menjadikan peran ganda pada perempuan yaitu sebagai perempuan dalam rumah tangga dan sebagai perempuan dalam pencari nafkah.

Peran UMKM banyak mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara termasuk perekonomian di wilayah Semarang, karena hadirnya UMKM mengurangi jumlah pengangguran kelas ekonomi menengah ke bawah. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap oleh UMKM Binaan di

Kota Semarang tahun 2022 ada 29.611 usaha, dengan serapan tenaga kerja perempuan ada 21.421 orang dan 11.706 orang laki-laki.

Kota Semarang juga melihat manfaat bank sampah, selain menjaga kelestarian alam, bank sampah juga menjadi sarana mendapatkan penghasilan. Terdapat lebih dari 500 bank sampah yang tersebar di Kota Semarang, tetapi data angka terkait pelaku yang bekerja di bidang bank sampah belum ada. Hanya dalam melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, jumlah tenaga kerja perempuan yang bergerak di bank sampah lebih banyak perempuan daripada laki-laki, karena perempuan memegang peran kunci dalam tata kelola keluarga dan pendidikan. Perempuan mampu menjadi kunci dalam mengendalikan produksi sampah rumah tangga.

10. Perempuan dan Pengambil Keputusan, Politik, Hukum, Jabatan Struktural

Saat ini ketika berbicara demokrasi, akses perempuan masuk dalam ranah politik menunjukkan peningkatan dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 53 yang menyatakan : daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah memberi kesempatan kepada perempuan untuk melibatkan dirinya dalam dunia politik. Berikut tersaji data peran laki-laki dan perempuan dalam ranah politik dan hukum, sehingga dapat terlihat peran perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi pengambilan keputusan baik di bidang hukum ataupun politik.

Tabel 4.31

Perempuan di Bidang Politik dan Hukum

No	Pegawai	L	P	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Anggota DPRD	38	9	47	org
2	Jumlah Pimpinan DPRD	4	0	4	org
3	Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri	34	13	47	org
4	Jumlah Pejabat di Pengadilan Negeri	9	3	12	org
5	Jumlah Hakim di Pengadilan Agama	6	2	8	org
6	Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri	23	21	44	org
7	Jumlah Kepala Polres	1	-	-	org

Profil Gender Kota Semarang

8	Jumlah Polisi Kepala Sektor (Kapolsek)	14	2	17	org
9	Jumlah Polisi di Wilayah Polres	1.821	144	1.965	org
10	Jumlah Pejabat Polisi di Wilayah Polres	32	8	40	org

Sumber : DPRD, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polrestabes di Kota Semarang, tahun 2023

Ada 9 orang perempuan dari 38 orang laki-laki yang menjadi anggota DPRD di Kota Semarang. Hal ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam mengambil kebijakan di pemerintahan belum mencapai 30% atau sekitar 20% dari total jumlah anggota DPRD saat ini. Ini mencerminkan meski kuota sudah disediakan sangat sedikit perempuan yang terpilih untuk duduk di lembaga legislatif. Alasannya ialah kaum perempuan tidak memilih perempuan yang dicalonkan karena aspirasinya belum tentu diperjuangkan. Padahal setidaknya dengan mendudukan perempuan aspirasi perempuan dapat diangkat menjadi produk dan kebijakan pro perempuan.

Data lain pun menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki mendapat posisi di berbagai bidang pekerjaan yang terkait dengan ranah politik dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di ranah politik dan hukum masih terjadi kesenjangan. Beberapa hal yang menghambat perempuan berkembang pada ranah politik yaitu: pertama, pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar sehingga membatasi partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pengambil keputusan. Kedua, peran dan organisasi partai politik dalam kepengurusan yang masih dominan laki-laki di setiap partai politik. Ketiga, banyak perempuan yang kurang berminat berkecimpung di dunia politik

Perlunya perubahan pola berpikir pada masyarakat dalam peran perempuan di ranah politik dan hukum karena dengan menempatkan perempuan dalam jumlah yang lebih seimbang dengan jumlah laki-laki akan membuat kebijakan daerah mengarah pada perlindungan akan kepentingan perempuan.

a) Jumlah Pejabat Struktural dan Pegawai Negeri Sipil

Banyak yang berpendapat bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin daripada perempuan. Asumsi ini menimbulkan marginalisasi dan dinamika bagi perempuan untuk memperoleh jabatan struktural di lingkungan kerjanya, dan hal ini juga terjadi di Kota Semarang.

Data pada tabel berikut menunjukkan gambaran mengenai jumlah pejabat dan pegawai negeri sipil tahun 2022

Tabel 4.32

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang

No.	Data	L	P	Total	Ket
1	Kepala Badan/Dinas (Eselon II)	26	5	31	1 Orang Sekretaris Daerah, 1 Orang Sekretaris DPRD, 1 Orang Direktur RSUD, 28 Orang Kepala Dinas/Badan Dari 31 : 1 orang Direktur RSUD dan 4 Kepala Dinas perempuan
2	Eselon II bukan Kepala Perangkat Daerah	4	2	6	3 Orang (P=1, L=2) Asisten Sekda, 3 Orang (P=1, L=2) Staf Ahli Walikota
3	Camat	14	0	14	Dari 16 Kecamatan, ada 2 Camat yang pensiun
4	Lurah	96	61	157	Dari 177 Kelurahan, ada 20 Lurah yang pensiun
5	Pengurus Partai Politik	0	0	0	Tidak mempunyai data yang diminta
6	PNS Kantor Sekda	75	74	149	Termasuk 2 Asisten Sekda
7	PNS Badan/Dinas	2224	3905	6129	Terdiri dari 30 Badan/Dinas
8	PNS RSUD	95	280	375	Termasuk 1 Direktur RSUD
9	Walikota	-	1	1	
10	Wakil Walikota	1	-	1	
11	PNS Kecamatan	143	107	250	Termasuk 14 Camat
12	PNS Kelurahan	525	446	971	Termasuk 157 Lurah
13	Jabatan Fungsional, Struktural pada dinas pemerintahan pejabat eselon III, IV	1934	3919	5853	Eselon III sudah termasuk Camat, Eselon IV sudah termasuk Lurah, Jabatan Fungsional sudah termasuk Guru
14	PNS Fungsional Guru	798	2071	2869	
15	Kepala Sekolah	125	230	355	

NOTE : Tanpa CPNS

Sumber : BKPP Kota Semarang, tahun 2023

PNS dengan kedudukan setingkat eselon II baik Kepala maupun Bukan Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, PNS Kantor Sekda, Wakil Walikota, PNS Kecamatan, PNS Kelurahan lebih dominan laki-laki daripada perempuan. Sedangkan PNS Badan/Dinas, PNS RSUD, Walikota, Jabatan Fungsional, Struktural pada dinas pemerintahan pejabat eselon III, IV, PNS Fungsional Guru dan Kepala Sekolah memiliki jumlah lebih banyak perempuan daripada laki-laki.

11. Perempuan dan Sosial Budaya

Berbicara tentang sosial budaya berbicara juga mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Ada dua bidang dalam Dinas Sosial yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu bidang Rehabilitasi Sosial dan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- a. Bidang Rehabilitasi Sosial menangani rehabilitasi anak terlantar, yaitu anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus semisal pendampingan hukum dan pendampingan rehabilitasi dari kecanduan obat-obatan terlarang.
- b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani terkait Penjangkauan, Rujukan, dan Pemantauan Anak Terlantar. Penanganan anak terlantar atau anak yang membutuhkan penanganan khusus akan dijangkau oleh Dinas Sosial. Petugas akan mengasasmen apa yang sekiranya dibutuhkan dan penanganan yang tepat untuk anak tersebut. Setelah itu, anak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke panti, atau dititipkan kepada kerabat yang memungkinkan untuk merawat anak tersebut. Dinas Sosial akan memantau keadaan anak tersebut apakah perlu dirawat atau tidak.

Data dibawah menunjukkan gambaran mengenai keadaan sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Semarang.

Tabel 4.33
Data PMKS di Kota Semarang
Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah			Santuan
		L	P	Jml	
1	Jumlah PMKS			186.675	orang
2	Balita terlantar	2	1	3	kasus
3	Anak terlantar	4	3	7	kasus
4	Anak yang tinggal di panti asuhan milik masyarakat	993	1.117	2.110	anak
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			100	%
6	Anak terdampak pandemic	73	63	136	anak
7	Kasus anak yang ditangani Dinsos dan didampingi SAKTI Peksos	13	27	40	kasus
8	Anak mengalami kekerasan	1	2	3	anak
9	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	4	5	anak
10	Anak dengan keterbatasan atau disabilitas	10	7	17	kasus

Profil Gender Kota Semarang

11	Penyandang disabilitas (tahun 2021)	2.921	2.791	5.712	orang
12	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	-	1	anak
13	Anak dalam situasi rentan	186	169	355	anak
14	Jumlah fakir miskin	1.467	1.083	2.550	anak
15	Rumah Tangga miskin yang memperoleh Program PKH			30.172	KK
16	Jumlah Karang Taruna			178	Isi
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)			115	Isi

Sumber : Dinas Sosial, tahun 2023

Dalam menjalankan kegiatan perlindungan anak, Dinas Sosial bekerjasama dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan juga PSA yang ada di kota Semarang, baik itu milik Panti milik pemerintah atau milik swasta. Kerjasama tersebut dalam hal penanganan dan pemantauan terhadap anak terlantar. Apabila ada anak terlantar, maka PSM dapat menginformasikan kepada Dinas Sosial. PSM membantu memantau progress dari anak tersebut.

12. Perempuan dan Kekerasan

a) Perempuan dan Kekerasan

Perempuan dan anak adalah kelompok paling rentan mendapatkan kekerasan. Salah satu yang membuat tindakan kekerasan pada perempuan dan anak adalah adanya nilai-nilai yang diyakini masyarakat yakni perihal budaya patriarki. Budaya patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pihak superior sehingga ia dapat menguasai dan mengontrol perempuan. Dengan kata lain, budaya ini menempatkan perempuan ter subordinasi atau menjadi orang nomor dua. Selain itu, didukung pula dengan adanya stereotype gender yang menganggap perempuan lemah dan laki-laki selalu kuat.

Data dibawah menunjukkan jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan dari negara.

Tabel 4.34
Korban Kekerasan Menurut Umur
Tahun 2022

N o	Kota	Kas us	Usia							Jml
			Anak			Dewasa				
			0-5	6-12	13-18	19-24	25-44	45-59	60+	
	Semarang	209	7	41	59	24	69	13	4	217

sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>, Kamis, 6 Juli 2023

Terdapat 107 korban anak dan 110 korban dewasa termasuk korban dari luar kota yang mendapat penanganan di Kota Semarang dan

semua berjenis kelamin perempuan. Korban terbanyak mengalami kekerasan ada di kisaran usia 24-44 tahun atau usia produktif dengan jumlah 69 orang. Selanjutnya di kisaran usia 13-18 tahun atau usia anak sekolah dengan jumlah 59 anak.

Tabel 4.35
Korban Perempuan Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2022

Kota	Pekerjaan									Total
	NA (tidak diketahui)	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	Ibu RT	Swasta	Buruh	PNS/ TNI/POLRI	Pedangan/ petani/ nelayan	
Semarang	0	17	87	35	30	30	11	27	8	217

sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>, Kamis, 6 Juli 2023

Data menunjukkan terdapat 217 korban menurut jenis pekerjaannya termasuk korban dari luar kota yang mendapat penanganan di Kota Semarang. Korban terbanyak yang dialami perempuan adalah perempuan bekerja dan pelajar. perempuan. Dan terbanyak mengalami kekerasan ada pada perempuan bekerja dengan jumlah 87 orang dan pada pelajar sebanyak 35 orang.

Korban kekerasan juga banyak terjadi di usia produktif karena biasanya mereka masih berstatus sebagai istri atau pasangan sehingga peluang terjadi kekerasan cukup besar. Di usia produktif perempuan memiliki tawar yang lebih kuat dibandingkan usia lainnya sehingga peluang dijadikan sasaran Korban kekerasan juga banyak terjadi di usia produktif karena biasanya mereka masih berstatus sebagai istri atau pasangan sehingga peluang terjadi kekerasan cukup besar. Di usia produktif perempuan memiliki tawar yang lebih kuat dibandingkan usia lainnya sehingga peluang dijadikan sasaran kekerasan cukup tinggi.

Tabel 4.36
Korban Perempuan Menurut Status Perkawinan
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Status Perkawinan				Total Korban
		NA	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
	Total	0	120	90	7	217

Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>, Kamis, 6 Juli 2023

Adapun korban kekerasan berdasar status pernikahan terdapat 120 orang yang berstatus belum menikah; 90 orang berstatus menikah dan 7 orang berstatus cerai. Sehingga keseluruhan kasus terdapat 217 korban termasuk korban dari luar kota yang mendapat penanganan di Kota Semarang.

Korban kekerasan yang banyak terjadi berstatus single dan terjadi ketika dalam masa berpacaran. Dalam berpacaran, perempuan memposisikan dirinya sebagai makhluk yang harus mendapat perlindungan dari lawan jenisnya. Perasaan tersebut bisa menimbulkan perempuan sebagai makhluk lemah yang pada akhirnya hidupnya akan dikontrol oleh laki-laki sebagai pacar. Hal ini yang menyebabkan banyaknya korban perempuan berstatus single di Kota Semarang.

Kekerasan juga banyak terjadi dalam perkawinan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh budaya patriarki dimana laki-laki secara kultural telah dibentuk secara dominan dalam segala aspek sehingga ketika relasi kuasa tidak seimbang kekerasan dan ketidakadilan menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar muncul. Tindak kekerasan juga dianggap sesuatu yang lumrah karena sebagai proses pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak. Hal ini dibungkus pula dengan rasa cinta kasih dan komitmen pada pasangan, ketergantungan ekonomi, demi anak-anak sehingga menyebabkan perempuan mengalah, rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman, pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat korban tetap mempertahankan perkawinan dan tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan

anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan perempuan.

Tabel 4.37
Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kasus	Gender	Total Korban		
				Anak	Dewasa	Jumlah
1	Luar Kota Semarang	7	L	0	0	0
			P	5	2	7
2	Mijen	9	L	2	0	2
			P	5	3	8
3	Gunungpati	12	L	1	0	1
			P	3	8	11
4	Banyumanik	15	L	4	0	4
			P	7	6	13
5	Gajah Mungkur	9	L	1	0	1
			P	2	6	8
6	Semarang Selatan	4	L	0	0	0
			P	3	1	4
7	Candisari	3	L	0	0	0
			P	2	1	3
8	Tembalang	17	L	0	0	0
			P	8	9	17
9	Pedurungan	22	L	0	0	0
			P	7	15	22
10	Genuk	10	L	0	0	0
			P	8	3	11
11	Gayamsari	12	L	0	0	0
			P	8	5	13
12	Semarang Timur	32	L	5	0	5
			P	14	17	31
13	Semarang Utara	29	L	3	0	3
			P	16	12	28
14	Semarang Tengah	15	L	4	0	4

Profil Gender Kota Semarang

			P	7	6	13
15	Semarang Barat	14	L	5	0	5
			P	6	6	12
16	Tugu	4	L	1	0	1
			P	0	3	3
17	Ngaliyan	14	L	3	0	3
			P	6	7	13
	Total			136	110	246

Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>, Kamis, 6 Juli 2023

Korban kekerasan menurut jenis kelamin menunjukkan sebagian besar korban adalah perempuan. Korban perempuan terbanyak ada di wilayah Semarang Timur dengan jumlah 31 orang, sedangkan korban laki-laki terbanyak ada di wilayah Semarang Timur dan Semarang Barat dengan jumlah 5 orang.

Selama ini korban kekerasan lebih banyak terjadi terhadap perempuan dan anak karena perempuan distigma sosial oleh masyarakat sebagai makhluk yang lemah atau dipersepsikan tidak berdaya sehingga mudah menjadi sasaran tindak kekerasan. Pelaku kekerasan cenderung menggunakan perempuan dan anak sebagai pelampiasan karena dianggap tidak bisa melawan dibandingkan laki-laki.

Secara teoritis kekerasan banyak terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti suami/isteri/anak/ayah/paman dan orang yang mempunyai relasi dekat dengan korban.

b) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Merujuk Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2023 tentang Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 8 huruf e dapat membentuk dan memfasilitasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- Pengaduan masyarakat;
- Pengaduan korban;
- Pengelolaan kasus;

- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

Sementara jenis kasus yang ditangani oleh UPTD PPA adalah :

- a. Korban kekerasan di lingkup rumah tangga (Fisik, psikis, seksual dan penelantaran);
- b. Korban kekerasan di ruang publik (fisik, psikis dan seksual) dan perempuan korban diskriminasi;
- c. Korban perdagangan orang (trafficking);
- d. Anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai korban, saksi dan pelaku);
- e. Anak korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), pornografi dan ABK

Adapun Program UPTD PPA yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 adalah :

- 1. Penguatan jejaring mitra dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2. Penguatan kapasitas manajemen internal UPTD PPA dalam penjangkauan, pengaduan, penanganan, pemulihan dan rehabilitasi perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 4.38

Data Korban Penyalahgunaan Narkoba

Tahun 2022

Uraian	Korban	
	Laki-laki	Perempuan
Penyalah Guna Narkoba Rawat Jalan Enggal Waras	16 orang	3 orang
Penyalah Guna Narkoba Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	1 orang	2 orang

Profil Gender Kota Semarang

Jumlah	17 orang	5 orang
Total seluruh yang mengakses rehabilitasi rawat jalan	22 orang	

Sumber : Indonesia Drugs Report, BNNP Jateng tahun 2023

Untuk data korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan perbedaan jumlah korban terbanyak, bahwa korban yang terbanyak ada pada laki-laki dengan jumlah 17 orang dan perempuan ada 5 orang. Sedangkan yang mengakses rehabilitasi rawat jalan ada 22 orang.

Secara umum data kekerasan membuktikan bahwa masih banyak korban perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan dari negara, baik melalui pengawasan secara terus menerus terkait implementasi regulasi untuk perlindungan korban atau upaya membentuk ruang aman bagi korban melalui regulasi dan tindakan sosial atau partisipasi masyarakat.

BAB V
PENUTUP

1. Kategori IPM Kota Semarang termasuk .tinggi, karena nilainya sudah diatas angka 80, artinya kualitas hidup laki-laki dan perempuan di Kota Semarang baik, tetapi masih terjadi kesenjangan dimana perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki baik dibidang pendidikan, kesehatan, pendapatan / ekonomi dan lainnya dimana IPM laki-laki sebesar 86,15 dan IPM perempuan sebesar 82,64.
2. Untuk IPG Kota Semarang di tahun 2022 sebesar 95,93, artinya di tahun 2022 terdapat kesenjangan gender pada hasil pembangunan sebesar 4,07 yang seharusnya bernilai 100.
3. Pengukuran IDG bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan dapat memainkan peranannya dan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
 - a) IDG berdasar kesenjangan terhadap laki-laki tahun 2022 sebesar 73,9. artinya terdapat kesenjangan yang cukup tinggi dalam pengukuran peran perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan ekonomi dan politik.
 - b) IDG berdasar peran perempuan di parlemen tahun 2022 menunjukkan angka 18,00 yang artinya masih sedikit peran perempuan di ranah politik dan pengambil keputusan.
4. Pengeluaran per kapita menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan. Secara rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di Kota Semarang menunjukkan besaran Rp. 16.047.000/tahun. Sedangkan pengeluaran

per kapita laki-laki lebih besar daripada perempuan dengan besaran Rp. 17.115.000/th untuk laki-laki dan Rp. 14.908.000/th untuk perempuan.

5. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Dan AHH laki-laki di Kota Semarang sebesar 75.94 sedangkan perempuan sebesar 79.61.

6. Perempuan dan Kesehatan

Capaian kesehatan ibu dan anak di Kota Semarang baik. Hal ini ditunjukkan dari laporan capaian kesehatan bahwa ibu hamil dan melahirkan sadar untuk rajin kunjung periksa di fasilitas kesehatan agar janin terpantau dengan baik. Walau demikian masih ada kematian ibu hamil dan nifas dengan besaran 67,25/100.000KH atau 15 kasus dari 22.040 kelahiran. Dan dari kelahiran tersebut terdapat kasus kematian bayi sebanyak 125 bayi; BBLR 499 bayi; kematian balita 22 anak; kasus gizi buruk 24 anak dan kasus stunting 1.465 anak.

Dalam kepesertaan KB masih banyak perempuan yang harus menggunakan alat kontrasepsi daripada laki-laki. Dari pasangan usia subur 239.049 pasangan di tahun 2022, peserta KB laki-laki hanya sebanyak 717 orang, sedangkan perempuan sebanyak 59.926 orang. Kesadaran dalam mengatur waktu kelahiran anak lebih tinggi perempuan daripada laki-laki, ini membuktikan bahwa sosialisasi pemerintah mengenai KB lebih bisa diterima kaum perempuan daripada laki-laki. Dan menurut perempuan, dengan ber-KB dan mengatur waktu lahir anak akan menentukan kualitas keluarga daripada tidak ber-KB.

Tenaga kesehatan lebih dominan diperankan oleh perempuan, sedangkan hanya dokter spesialis yang memiliki jumlah dokter laki-laki lebih banyak dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peluang kerja di bidang kesehatan lebih terbuka untuk kaum perempuan daripada laki-laki.

7. Perempuan dan Pendidikan

Dilihat dari rata-rata APK, APM dan APS untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP dan SMA menunjukkan bahwa peluang mendapat pendidikan yang setara antara laki-laki dengan perempuan belum mencapai keseimbangan. Karena nilai APK, APM dan APS lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Sedangkan tenaga pendidik terbanyak ada di jenis kelamin perempuan, dan anak didik lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

8. Perempuan dan Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Komunikasi

Terdapat 557.795 orang laki-laki dan 436.296 orang perempuan yang bekerja. Sedangkan jumlah pengangguran laki-laki sebanyak 61.368 orang dan jumlah pengangguran perempuan ada 20.368 orang. Kesenjangan yang besar ini bukan berarti banyak pengangguran laki-laki, melainkan ada perempuan yang menyatakan bahwa status ibu rumah tangga dimasukkan sebagai pekerjaan utama perempuan, sehingga tampak perempuan yang menganggur lebih kecil jumlahnya daripada laki-laki.

Penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan terbanyak secara berurutan yaitu : jasa, manufaktur dan pertanian. Hal ini wajar karena Kota Semarang bukan kota yang memiliki lahan luas untuk pertanian melainkan kota besar yang banyak pabrik dan perusahaan jasa.

penduduk laki-laki maupun perempuan pekerja yang terbanyak berpendidikan SMA baik SMA Umum maupun SMA Kejuruan. Angkatan kerja laki-laki maupun perempuan terbanyak berada pada jenjang pendidikan SMA baik SMA Umum maupun SMA Kejuruan. Tetapi untuk status laki-laki pengangguran terbanyak memiliki pendidikan SMP dan SMA umum, sedangkan perempuan pengangguran memiliki pendidikan SMA kejuruan dan SMA umum.

Perempuan yang mengelola usaha mikro ada 20.251 orang sedangkan laki-laki yang mengelola usaha mikro ada 9.360 orang. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang yang besar untuk berkembang di dunia usaha mikro dibandingkan dengan laki-laki.

9. Perempuan dan Pengambilan Keputusan Politik dan Hukum

Keterwakilan perempuan dalam mengambil kebijakan di pemerintahan belum mencapai 30% atau sekitar 20% dari total jumlah anggota DPRD. Di bidang hukum dan jabatan struktural di pemerintahan Kota Semarang menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terjadi kesenjangan gender di ranah politik, hukum dan jabatan struktural.

10. Perempuan dan Sosial Budaya

Data PMKS menunjukkan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis baik laki-laki maupun perempuan sejauh ini telah tertangani dengan baik dengan melakukan pelayanan dan dampingan untuk kebutuhan dasarnya.

11. Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Terdapat 107 korban anak dan 110 korban dewasa termasuk korban dari luar kota yang mendapat penanganan di Kota Semarang dan semua berjenis kelamin perempuan.

Terdapat 217 korban menurut jenis pekerjaannya termasuk korban dari luar kota yang mendapat penanganan di Kota Semarang.

Adapun korban kekerasan berdasar status pernikahan terdapat 120 orang yang berstatus belum menikah; 90 orang berstatus menikah dan 7 orang berstatus cerai.

Korban kekerasan menurut jenis kelamin menunjukkan sebagian besar korban adalah perempuan.

Untuk data korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan perbedaan jumlah korban terbanyak, bahwa korban yang terbanyak ada pada

laki-laki dengan jumlah 17 orang dan perempuan ada 5 orang. Sedangkan yang mengakses rehabilitasi rawat jalan ada 22 orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ch., Mufidah. Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial. Malang: UIN-MALIKI Press, 2010, hal 8-11
- Inpres No.9 tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- Kepmendagri No. 132 Tahun 2003, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bab I, Ketentuan Umum, pasal 1, nomor 3 dan 4
- Pemodelan Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Pemodelan Regresi Nonparametrik Spline di Indonesia, Nurul Fajriyyah dan I Nyoman Budiantara, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol.4, No.2, 2015
- Silawati. Hartian, Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana?, Jurnal Perempuan Pengarusutamaan Gender, Jakarta, 2006, vol. 50, hal. 20
- <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

LAMPIRAN

Jumlah Guru di Kota Semarang Tahun Ajaran 2021/2022

No	Wilayah	Total			TK			KB			TPA			SPS			PKBM			SKB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Semarang Barat	1,703	526	1,177	152	3	149	41	2	39	1	0	1	20	0	20	6	2	4	0	0	0
2	Kec. Pedurungan	1,681	419	1,262	208	3	205	65	1	64	16	1	15	66	0	66	16	5	11	0	0	0
3	Kec. Banyumanik	1,61	497	1,113	176	4	172	50	1	49	1	0	1	54	0	54	42	18	24	0	0	0
4	Kec. Semarang Selatan	1,474	543	931	89	0	89	27	1	26	2	1	1	16	0	16	5	1	4	0	0	0
5	Kec. Semarang Tengah	1,455	525	930	79	0	79	22	1	21	3	0	3	12	0	12	6	5	1	0	0	0
6	Kec. Tembalang	1,333	369	964	154	4	150	65	2	63	9	0	9	107	0	107	1	0	1	0	0	0
7	Kec. Semarang Timur	1,128	402	726	69	1	68	16	0	16	5	0	5	20	0	20	14	10	4	0	0	0
8	Kec. Ngaliyan	985	301	684	128	3	125	38	0	38	7	0	7	30	1	29	13	4	9	0	0	0
9	Kec. Mijen	970	312	658	87	0	87	25	0	25	2	0	2	22	0	22	0	0	0	0	0	0
10	Kec. Gunung Pati	909	270	639	70	0	70	41	0	41	1	0	1	43	0	43	11	4	7	19	5	14
11	Kec. Genuk	878	272	606	79	1	78	18	0	18	2	0	2	68	2	66	48	21	27	0	0	0
12	Kec. Candisari	803	241	562	84	0	84	13	0	13	0	0	0	11	0	11	17	4	13	0	0	0
13	Kec. Semarang Utara	784	268	516	77	0	77	21	1	20	0	0	0	27	1	26	19	7	12	0	0	0
14	Kec. Gajah Mungkur	764	212	552	87	1	86	17	0	17	6	0	6	26	0	26	26	3	23	0	0	0
15	Kec. Gayamsari	709	220	489	47	0	47	9	0	9	0	0	0	26	1	25	0	0	0	0	0	0
16	Kec. Tugu	379	143	236	25	1	24	8	0	8	0	0	0	20	0	20	14	3	11	0	0	0
Total	Total	17,565	5,52	12,045	1,611	21	1,59	476	9	467	55	2	53	568	5	563	238	87	151	19	5	14

Profil Gender Kota Semarang

No	Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Semarang Barat	724	204	520	369	144	225	273	127	146	110	42	68	7	2	5
2	Kec. Pedurungan	657	186	471	334	109	225	121	44	77	157	61	96	41	9	32
3	Kec. Banyumanik	602	196	406	332	122	210	211	88	123	137	68	69	5	0	5
4	Kec. Semarang Selatan	371	107	264	282	90	192	240	114	126	442	229	213	0	0	0
5	Kec. Semarang Tengah	412	136	276	370	145	225	230	109	121	253	106	147	68	23	45
6	Kec. Tembalang	504	162	342	271	109	162	53	23	30	55	29	26	114	40	74
7	Kec. Semarang Timur	379	122	257	197	67	130	68	30	38	360	172	188	0	0	0
8	Kec. Ngaliyan	452	159	293	133	57	76	101	40	61	83	37	46	0	0	0
9	Kec. Mijen	407	131	276	225	89	136	110	43	67	92	49	43	0	0	0
10	Kec. Gunung Pati	341	98	243	204	76	128	117	58	59	62	29	33	0	0	0
11	Kec. Genuk	354	114	240	170	71	99	70	32	38	69	31	38	0	0	0
12	Kec. Candisari	377	107	270	175	64	111	39	16	23	81	48	33	6	2	4
13	Kec. Semarang Utara	349	113	236	94	32	62	63	24	39	127	86	41	7	4	3
14	Kec. Gajah Mungkur	281	82	199	158	58	100	84	38	46	79	30	49	0	0	0
15	Kec. Gayamsari	254	65	189	141	50	91	54	31	23	178	73	105	0	0	0
16	Kec. Tugu	122	40	82	99	44	55	37	20	17	54	35	19	0	0	0
Total	Total	6,586	2,022	4,564	3,554	1,327	2,227	1,871	837	1,034	2,339	1,125	1,214	248	80	168

Profil Gender Kota Semarang

Jumlah Anak Didik di Kota Semarang Tahun Ajaran 2021/2022

No	Wilayah Kecamatan	Total			TK			KB			TPA			SPS			PKBM			SKB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Pedurungan	28,889	14,473	14,416	3,854	2,013	1,841	550	285	265	83	47	36	447	211	236	253	140	113	0	0	0
2	Banyumanik	27,305	14,085	13,22	2,581	1,337	1,244	392	201	191	12	6	6	347	176	171	307	187	120	0	0	0
3	Semarang Selatan	27,007	13,903	13,104	1,16	574	586	151	79	72	5	4	1	71	34	37	19	10	9	0	0	0
4	Semarang Barat	26,739	13,691	13,048	2,677	1,412	1,265	341	167	174	9	3	6	184	96	88	0	0	0	0	0	0
5	Semarang Tengah	22,752	11,726	11,026	1,145	592	553	145	77	68	1	1	0	187	88	99	46	25	21	0	0	0
6	Tembalang	22,705	11,847	10,858	2,948	1,558	1,39	547	279	268	55	26	29	880	416	464	287	173	114	0	0	0
7	Semarang Timur	20,711	10,269	10,442	1,509	758	751	111	51	60	41	21	20	229	116	113	318	224	94	0	0	0
8	Mijen	18,449	9,583	8,866	1,667	860	807	250	138	112	33	19	14	344	166	178	104	81	23	0	0	0
9	Ngaliyan	17,416	8,694	8,722	1,954	1,017	937	270	136	134	9	8	1	300	144	156	123	79	44	0	0	0
10	Genuk	17,392	8,858	8,534	1,827	964	863	213	104	109	35	20	15	873	418	455	1,456	769	687	0	0	0
11	Gunung Pati	14,634	7,489	7,145	1,228	633	595	482	245	237	0	0	0	529	263	266	56	28	28	298	167	131
12	Semarang Utara	14,446	7,826	6,62	1,787	914	873	276	142	134	0	0	0	471	222	249	285	182	103	0	0	0
13	Candisari	12,816	6,858	5,958	1,298	649	649	142	82	60	0	0	0	102	60	42	109	61	48	0	0	0
14	Gayamsari	12,799	6,761	6,038	1,081	560	521	44	23	21	0	0	0	157	71	86	0	0	0	0	0	0

Profil Gender Kota Semarang

15	Gajah Mungkur	12,555	6,548	6,007	1,392	703	689	73	42	31	34	20	14	194	97	97	133	95	38	0	0	0
16	Tugu	7,128	3,897	3,231	473	255	218	104	51	53	0	0	0	258	115	143	144	88	56	0	0	0
To tal	Total	303,743	156,508	147,235	28,581	14,799	13,782	4,091	2,102	1,989	317	175	142	5,573	2,693	2,88	3,64	2,142	1,498	298	167	131

Profil Gender Kota Semarang

No	Wilayah	SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Pedurungan	13,893	7,111	6,782	5,876	2,913	2,963	1,746	764	982	1,987	866	1,121	200	123	77
2	Kec. Banyumanik	12,639	6,595	6,044	5,33	2,671	2,659	3,467	1,633	1,834	2,216	1,269	947	14	10	4
3	Kec. Semarang Selatan	7,164	3,681	3,483	5,607	2,771	2,836	4,531	2,105	2,426	8,299	4,645	3,654	0	0	0
4	Kec. Semarang Barat	12,881	6,664	6,217	6,135	3,09	3,045	3,386	1,567	1,819	1,112	683	429	14	9	5
5	Kec. Semarang Tengah	7,118	3,633	3,485	6,432	3,283	3,149	3,905	1,725	2,18	3,453	2,11	1,343	320	192	128
6	Kec. Tembalang	11,162	5,845	5,317	4,764	2,417	2,347	1,077	454	623	315	270	45	670	409	261
7	Kec. Semarang Timur	7,279	3,752	3,527	3,598	1,815	1,783	1,106	550	556	6,52	2,982	3,538	0	0	0
8	Kec. Mijen	8,384	4,324	4,06	4,121	2,072	2,049	1,816	755	1,061	1,73	1,168	562	0	0	0
9	Kec. Ngaliyan	9,118	4,661	4,457	2,571	1,285	1,286	2,149	876	1,273	922	488	434	0	0	0
10	Kec. Genuk	7,936	4,027	3,909	2,955	1,575	1,38	1,219	558	661	878	423	455	0	0	0
11	Kec. Gunung Pati	5,79	3,018	2,772	3,967	2,023	1,944	1,769	728	1,041	515	384	131	0	0	0
12	Kec. Semarang Utara	6,967	3,609	3,358	1,532	802	730	1,165	525	640	1,918	1,405	513	45	25	20
13	Kec. Candisari	6,842	3,518	3,324	2,889	1,439	1,45	507	237	270	882	783	99	45	29	16
14	Kec. Gayamsari	5,477	2,85	2,627	2,477	1,388	1,089	691	372	319	2,872	1,497	1,375	0	0	0
15	Kec. Gajah Mungkur	5,698	2,906	2,792	3,072	1,606	1,466	990	474	516	969	605	364	0	0	0
16	Kec. Tugu	2,293	1,189	1,104	1,744	877	867	754	379	375	1,358	943	415	0	0	0
Total	Total	130,641	67,383	63,258	63,07	32,027	31,043	30,278	13,702	16,576	35,946	20,521	15,425	1,308	797	511

Korban Kekerasan Menurut Umur Tahun 2022

No	Kecamatan	Kasus	Gender	Usia							Jml
				Anak			Dewasa				
				0-5	6-12	13-18	19-24	25-44	45-59	60+	
1	Luar Kota Semarang	7	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	1	2	2	0	2	0	0	7
2	Mijen	8	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	1	1	3	0	3	0	0	8
3	Gunungpati	11	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	2	1	4	3	1	0	11
4	Banyumanik	12	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	3	4	3	3	0	0	13
5	Gajah Mungkur	8	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	2	0	0	5	1	0	8
6	Semarang Selatan	4	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	3	0	0	1	0	4
7	Candisari	3	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	2	1	0	0	0	3
8	Tembalang	17	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	1	1	6	1	4	3	1	17

Profil Gender Kota Semarang

9	Pedurungan	22	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	3	4	2	11	2	0	22
10	Genuk	10	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	4	4	1	2	0	0	11
11	Gayamsari	12	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	1	0	7	1	2	1	1	13
12	Semarang Timur	27	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	2	8	4	5	11	0	1	31
13	Semarang Utara	27	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	8	8	1	9	2	0	28
14	Semarang Tengah	13	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	2	5	0	6	0	0	13
15	Semarang Barat	12	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	3	3	2	1	2	1	12
16	Tugu	3	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	1	2	0	0	3
17	Ngaliyan	13	L	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	1	2	3	2	5	0	0	13
	Total	209		7	41	59	24	69	13	4	217

Korban Kekerasan Perempuan Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2022

No	Kecamatan	Ka su s	Ge nde r	Pekerjaan									Total
				NA (tida k dike tahu i)	Tid ak Bek erja	Be ker ja	Pel ajar	Ibu RT	Swas ta	Bur uh	PNS/ TNI/P OLRI	Pedan gan/pe tani/ne layan	
1	Luar Kota Semarang	7	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	1	1	3	0	2	0	0	0	7
2	Mijen	8	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	2	2	3	1	0	0	8
3	Gunungpati	11	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	6	4	1	0	0	0	11
4	Banyumanik	12	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	1	8	1	2	0	1	0	13
5	Gajah Mungkur	8	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	1	1	1	1	4	0	0	0	8
6	Semarang Selatan	4	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
7	Candisari	3	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
8	Tembalang	17	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	3	1	7	2	3	1	0	0	17

Profil Gender Kota Semarang

9	Pedurungan	22	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	2	2	6	6	2	0	1	3	22
10	Genuk	10	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	0	0	8	2	1	0	0	0	11
11	Gayamsari	12	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	6	1	4	1	0	0	0	1	13
12	Semarang Timur	27	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	5	3	10	5	4	2	0	2	31
13	Semarang Utara	27	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	3	2	14	3	3	2	0	1	28
14	Semarang Tengah	13	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	3	1	4	2	2	0	0	1	13
15	Semarang Barat	12	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	1	2	5	2	1	0	0	1	12
16	Tugu	3	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
17	Ngaliyan	13	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			P	0	1	0	6	2	2	2	0	0	13
Total				0	17	87	35	30	30	11	27	8	217

Korban Perempuan Menurut Status Perkawinan

No.	Kecamatan	Kasus	Gender	Status Perkawinan				Total Korban
				NA	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
1	Luar Kota Semarang	7	L	0	0	0	0	0
			P	0	5	1	1	7
2	Mijen	8	L	0	0	0	0	0
			P	0	4	4	0	8
3	Gunungpati	11	L	0	0	0	0	0
			P	0	6	5	0	11
4	Banyumanik	12	L	0	0	0	0	0
			P	0	8	5	0	13
5	Gajah Mungkur	8	L	0	0	0	0	0
			P	0	2	4	2	8
6	Semarang Selatan	4	L	0	0	0	0	0
			P	0	3	0	1	4
7	Candisari	3	L	0	0	0	0	0
			P	0	2	1	0	3
8	Tembalang	17	L	0	0	0	0	0
			P	0	9	7	1	17
9	Pedurungan	22	L	0	0	0	0	0
			P	0	8	13	1	22
10	Genuk	10	L	0	0	0	0	0
			P	0	8	3	0	11
11	Gayamsari	12	L	0	0	0	0	0

Profil Gender Kota Semarang

			P	0	9	4	0	13
12	Semarang Timur	27	L	0	0	0	0	0
			P	0	16	15	0	31
13	Semarang Utara	27	L	0	0	0	0	0
			P	0	17	10	1	28
14	Semarang Tengah	13	L	0	0	0	0	0
			P	0	8	5	0	13
15	Semarang Barat	12	L	0	0	0	0	0
			P	0	7	5	0	12
16	Tugu	3	L	0	0	0	0	0
			P	0	1	2	0	3
17	Ngaliyan	13	L	0	0	0	0	0
			P	0	7	6	0	13
	Total			0	120	90	7	217

Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kasus	Gender	Total Korban		
				Anak	Dewasa	Jumlah
1	Luar Kota Semarang	7	L	0	0	0
			P	5	2	7
2	Mijen	9	L	2	0	2
			P	5	3	8
3	Gunungpati	12	L	1	0	1
			P	3	8	11
4	Banyumanik	15	L	4	0	4
			P	7	6	13
5	Gajah Mungkur	9	L	1	0	1
			P	2	6	8
6	Semarang Selatan	4	L	0	0	0
			P	3	1	4
7	Candisari	3	L	0	0	0
			P	2	1	3
8	Tembalang	17	L	0	0	0
			P	8	9	17
9	Pedurungan	22	L	0	0	0
			P	7	15	22
10	Genuk	10	L	0	0	0
			P	8	3	11
11	Gayamsari	12	L	0	0	0
			P	8	5	13
12	Semarang Timur	32	L	5	0	5

Profil Gender Kota Semarang

			P	14	17	31
13	Semarang Utara	29	L	3	0	3
			P	16	12	28
14	Semarang Tengah	15	L	4	0	4
			P	7	6	13
15	Semarang Barat	14	L	5	0	5
			P	6	6	12
16	Tugu	4	L	1	0	1
			P	0	3	3
17	Ngaliyan	14	L	3	0	3
			P	6	7	13
	Total			136	110	246